



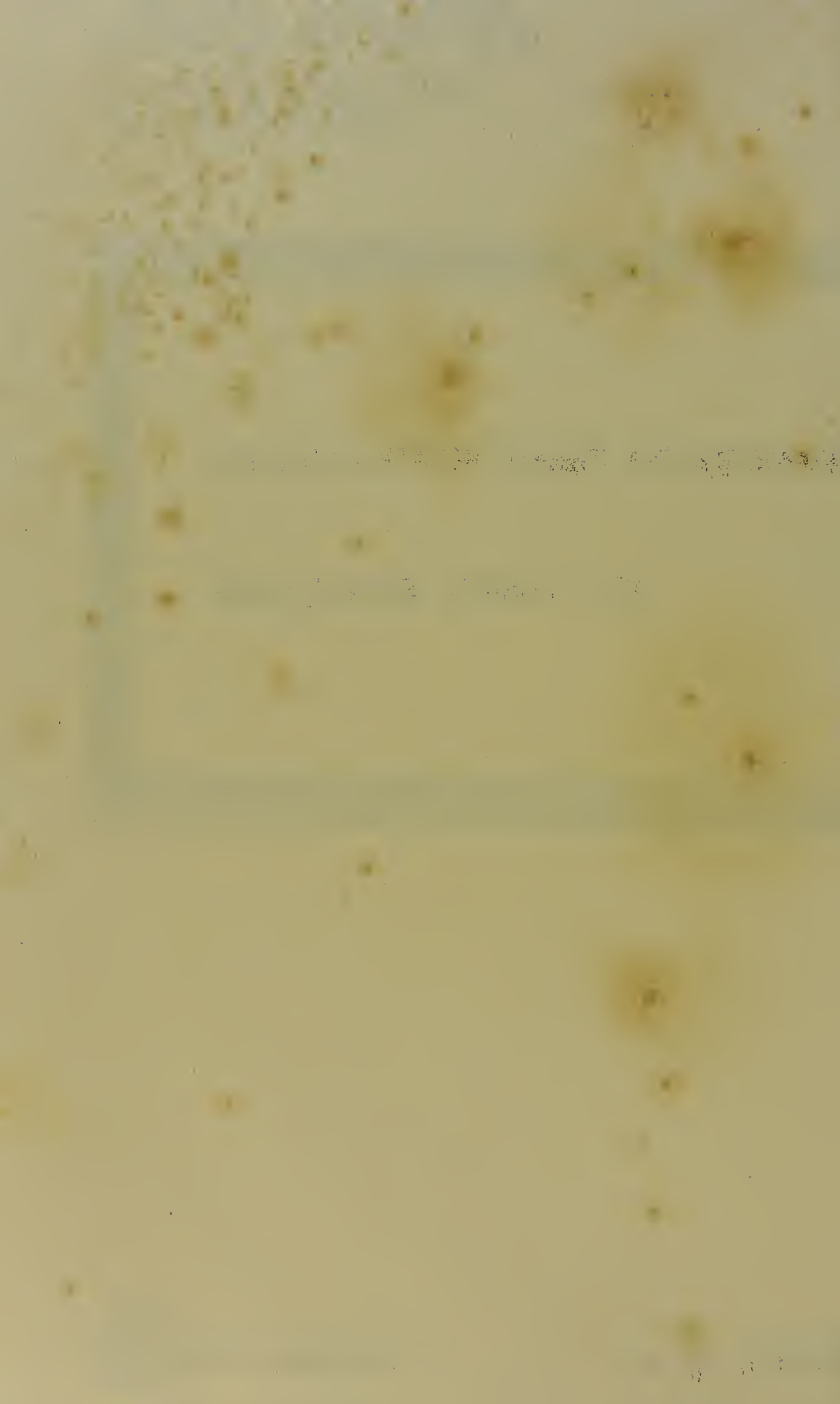
ANALISA

**MASALAH - MASALAH
INTERNASIONAL**

BEBERAPA PERKEMBANGAN

DI ASIA SELATAN





PENGANTAR PENERBIT

Ada beberapa hal yang membawa banyak perhatian ditujukan ke arah wilayah di sekitar anak benua India. Pertama kenyataan bahwa India telah mengadakan percobaan nuklir. Kedua persoalan sekitar Samudra Indonesia.

Sesudahnya India menunjukkan potensinya sebagai satu kekuatan nuklir, maka dengan sendirinya dunia akan selalu bertanya tentang apakah yang akan dilakukan India lebih lanjut. Dengan latar belakang ini maka masalah Sikkim tentu menjadi satu tema yang menarik banyak komentar dan interpretasi.

Mengenai Samudra Indonesia, soal ini semakin banyak dibahas pula. Beberapa pihak berulang kali menyatakan harapan agar Samudra besar itu diakui sebagai satu daerah yang aman dan bebas, tidak menjadi arena pertarungan kekuatan-kekuatan besar. Sementara itu tidak lagi dapat diungkiri bahwa Samudra itu telah menjadi semakin penting artinya di dalam strategi mondial. Tidak jarang dikemukakan pernyataan bahwa untuk menguasai dunia orang harus menguasai Samudra. Dan untuk saat ini serta masa depan nanti, Samudra Indonesia merupakan salah satu pusat perhatian dunia di samping Atlantik dan Pasifik.

Itulah sebabnya maka ANALISA bulan Desember 1974 ini menyajikan tiga karangan berkenaan dengan soal-soal tersebut di atas. Hubungan Sikkim dengan India dibahas oleh O. Sutomo ROESNADI. Satu artikel tentang Diego Garcia ditulis oleh Kirdi DIPOJUDO; dan satu artikel lagi tentang Aspek-aspek Security Dalam Hubungan Internasional di Samudra Indonesia oleh O. Abdul RACHMAN.

Semoga tulisan-tulisan tersebut membantu kita semua untuk mengikuti dan memahami perkembangan-perkembangan yang terjadi di Asia Selatan.



DAFTAR ISI

Hal.

Pengantar Penerbit

1

Hubungan Sikkim dengan India

O. Sutomo ROESNADI

3

Persoalan Sekitar Diego Garcia

Kirdi DIPOJUDO

21

Aspek-aspek Security dalam Hubungan

Internasional di Samudra Indonesia

O. Abdul RACHMAN

35

Diterbitkan oleh

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Tanah Abang III/27, Jakarta



1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

HUBUNGAN SIKKIM DENGAN INDIA

Sutomo ROESNADI

Persetujuan yang diberikan oleh Parlemen India pada tanggal 4 September 1974 terhadap Rencana Undang-undang Perubahan Konstitusi India untuk memasukkan Sikkim, sebuah negara kecil di pegunungan Himalaya, sebagai negara bagian India (associate State) memaksa kita untuk merenungkan kembali apa sebetulnya yang diinginkan India dari negara kecil seperti Sikkim tersebut.

Jika kita melihat geografi Sikkim dan India, maka tak dapat disangkal bahwa memang Sikkim mempunyai arti sangat penting bagi strategi pertahanan India. Sikkim terletak di antara Nepal di sebelah Barat, Tibet-PRC di sebelah Utara, Bhutan di sebelah Timur dan India serta Bangladesh di sebelah Selatan. Dengan demikian Sikkim merupakan sebuah negara yang berada jauh di daratan anak benua India, yang untuk jalan ke luar ke laut terbuka atau ke dunia luar mau tidak mau harus melalui wilayah India dan Bangladesh. Jika Sikkim dapat dikuasai oleh negara yang tidak bersahabat dengan India seperti PRC, maka berarti bahwa komunikasi India dengan wilayah India Timur (negara bagian Assam) atau dengan negara protektoratnya Bhutan akan terancam. Ancaman ini akan lebih berbahaya jika seandainya Bangladesh juga tidak bersahabat dengan India di kemudian hari, misalnya bersekutu dengan PRC.

Untuk mendalami peristiwa-peristiwa terakhir yang terjadi di Sikkim perlu kiranya diketahui latar belakang Sikkim secara umum sampai kepada perkembangan-perkembangan yang terjadi kemudian.

I.

Sikkim meliputi wilayah seluas 2.818 mil persegi dengan perbatasan-perbatasan seperti yang diterangkan di atas. Tergantung dari wilayah India sebelah mana orang melihat peta bumi Sikkim; jika berada di wilayah India sebelah Barat atau

Bangladesh maka Sikkim terletak di Timur Laut atau Utara India. Jika berada di wilayah sebelah Timur (negara bagian Assam) maka Sikkim terletak di sebelah Barat Laut.

Sampai tahun 1973 penduduk Sikkim berjumlah kurang lebih 200.000 jiwa, yang terdiri dari beberapa golongan penduduk. Pertama, bangsa Lepcha yang merupakan penduduk asli Sikkim. Kedua, bangsa Bhutia yang memasuki Sikkim pada abad ke-17 dari Tibet. Ketiga, bangsa Nepal yang bermigrasi ke Sikkim pada abad ke-19 atas dorongan Inggris. Pada saat ini bangsa Nepal itu merupakan mayoritas, ialah 70% dari seluruh penduduk. Keempat, orang Tsong, sebuah suku bangsa asal Nepal. Kelima, pengungsi-pengungsi Tibet yang bermukim di Sikkim sejak tahun 1956.

Anggota keluarga raja atau penguasa yang memerintah Sikkim berasal dari bangsawan Bhutia yang menggantikan Kepala bangsa Lepcha dalam abad ke-17. Raja keturunan Bhutia itu berhasil memasukkan agama Buddha Sekte Lama sebagai agama negara di Sikkim. Meskipun demikian sengketa-sengketa antara pengikut-pengikut bangsa Lepcha dan Bhutia terus berlangsung sampai abad ke-19. Pada dewasa ini kedua bangsa tersebut telah dapat hidup dengan rukun. Jika lau bangsa Lepcha dan Bhutia menganut agama Buddha, maka orang-orang Nepal memeluk agama Hindu.

Sebelum tahun 1817 Sikkim merupakan negara bahagian daripada Tibet, dan setelah tahun itu Inggris berhasil menempatkan Sikkim di bawah kekuasaannya. Pada tahun 1890 setelah diadakan perjanjian antara Inggris dan Cina, Sikkim diputuskan berada di bawah protektorat kerajaan India-Inggris, dan akan menerima petunjuk dan bimbingan Inggris dalam bidang hubungan luar negerinya. Keadaan ini terus berlangsung sampai saat India mencapai kemerdekaan dari Inggris di tahun 1947. Pemerintah India merdeka rupanya terus mewarisi tanggung jawab Inggris atas Sikkim tersebut pada tahun itu juga.

Dalam tahun 1949 terjadi pemberontakan terhadap raja Sikkim. India mengadakan intervensi langsung dengan mengirim tentaranya ke Sikkim dan kemudian mengambil alih pemerintahan Sikkim. Pada tahun 1950 India dan Sikkim menanda-tangani sebuah Treaty di mana India diserahi tanggung jawab dalam bidang-bidang pertahanan, hubungan luar negeri dan komunikasi Sikkim. Dapat dikemukakan di sini bahwa susunan Kementerian Luar Negeri India terdiri dari 10 Divisi yang dipimpin oleh seorang Joint Secretary atau Director, dan setiap divisi terdiri dari beberapa Seksi. Under-Secretary membawahi satu sampai empat Seksi

dan Deputy Secretary membawahi dua sampai enam Seksi. Deputy Secretary bagian Utara membawahi empat Seksi, yaitu: Nepal, Bantuan untuk Nepal, Sikkim dan Bhutan.

Setelah diadakan Treaty tersebut maka tentara India praktis ditempatkan di Sikkim secara permanen dan menduduki tempat strategis, karena Sikkim memang merupakan sebuah buffer state antara India dan Cina.

Akibat dari perkembangan-perkembangan politik yang terjadi di tahun 1953 dibentuk sebuah Dewan Negara yang terdiri dari 6 orang anggota yang ditunjuk oleh Raja, dan 18 orang anggota yang dipilih. Tujuh orang dari anggota yang dipilih disediakan untuk bangsa Bhutia dan Lepcha, dan tujuh untuk orang Nepal, sedangkan pendeta Buddha, suku-suku Tsong, dan suku terasing lainnya masing-masing mendapat sebuah kursi. Sisa sebuah kursi lainnya terbuka untuk umum. Setiap pemilih mempunyai 6 suara, sedangkan seorang calon yang berhasil menang biasanya mendapatkan suara dari masyarakat sukunya sendiri dan beberapa persentase dari masyarakat suku-suku lainnya. Kekuasaan Dewan Negara tersebut sangat terbatas, sedangkan rajalah yang memiliki kekuasaan penuh terhadap bidang-bidang keuangan, dalam negeri, urusan istana, dan hubungan dengan India. Raja mempunyai hak veto atas perundang-undangan yang harus disahkan oleh Dewan Negara.

Raja yang sekarang ialah Palden Thondup Namgyal yang lebih suka memakai gelar raja-raja Tibet yaitu Chogyal daripada gelar Maharaja seperti India. Beliau menggantikan ayahnya, Maharaja Sir Tashi Namgyal pada tahun 1963. Raja (Chogyal) Thondup Namgyal semenjak naik tahta kerajaan selalu mendesak untuk mengadakan perubahan Treaty India-Sikkim tahun 1950 yang beliau anggap terlalu berat sebelah, karena lebih banyak menguntungkan India daripada Sikkim. Raja menginginkan agar negaranya dianggap sederajat oleh India sebagaimana halnya dengan negara tetangganya Bhutan, yang meskipun tetap ada hubungan dengan India di bidang hubungan luar negeri dan pertahanan, oleh India diberikan lebih banyak kebebasan dan malahan menjadi anggota PBB pada tahun 1971.

Sebagai langkah pertama untuk melaksanakan keinginannya itu, raja mengambil alih kedudukan Ketua Dewan Menteri, yang pada waktu-waktu sebelumnya selalu dipegang oleh seorang Pegawai Negeri Tinggi Pemerintah India yang ditunjuk oleh Pemerintah India dan diangkat oleh Raja. Halun keinginan raja

Sikkim untuk secara drastis menyingkirkan pengaruh India dari Sikkim tidaklah mudah yang direncanakan. Pengaruh India boleh dikatakan sudah menyeluruh dan berakar dengan kuat.

Pengaruh-pengaruh India sangat menyolok dalam bantuan ekonomi kepada Sikkim untuk merealisasikan Rencana-rencana Pembangunan Ekonominya dari tahun 1954-1971. Bantuan India tersebut adalah hasil perundingan-perundingan Maharaja Sir Tashi Wangyal dengan Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru pada tahun 1952. Rencana Pembangunan pertama berjangka 7 tahun yaitu dari tahun 1954-1961. Bantuan India berupa grant langsung berjumlah Rupees 32,639 juta. Hasil nyata dari Rencana Pembangunan pertama itu ialah naiknya pendapatan per kapita rakyat Sikkim menjadi Rupees 700.--, berarti dua kali sebanyak pendapatan rakyat India sendiri.

Dalam Rencana Pembangunan kedua yang berjangka lima tahun (1961-1966) bantuan India kepada Sikkim berlipat ganda menjadi Rupees 63,637 juta. Titik berat pembangunan pertama terutama diletakkan pada pembangunan jalan-jalan dan jembatan-jembatan. Sedangkan dalam Pembangunan yang kedua masih tetap pada pembangunan jalan-jalan, ditambah dengan kesehatan, pendidikan, kehutanan dan tenaga listrik.

Rencana Pembangunan ke-3 (1966-1971) selain terus meningkatkan bidang-bidang tersebut juga dititik-beratkan kepada pertanian dan industri. Jumlah biaya pembangunan ketiga ini ialah sebesar Rupees 90,000 juta. Rencana Pembangunan keempat dimulai pada bulan April tahun 1971 dan akan berakhir pada tahun 1976. Dalam Rencana Pembangunan tersebut termasuk pembangunan proyek-proyek hidro-electric, industri, serta grant-grant khusus untuk bidang-bidang pertanian, pendidikan dan kesehatan.

Jikalau negara dalam keadaan bahaya, terutama waktu perang, maka mobilitas militer dan penduduk sangat penting, dan untuk ini diperlukan jaringan jalan yang baik. Pembangunan jalan-jalan raya utama di Sikkim rupanya oleh perencana-perencana India selalu dihubungkan dengan tempat-tempat strategis di wilayah perbatasan India sendiri. Misalnya antara Gangtok (Ibukota Sikkim) dengan Rangpo, kota perbatasan antara Benggala Barat India dan Sikkim, yang sebelum tahun 1954 hanya sepanjang 50 km yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Dan untuk seluruh negara Sikkim hanya terdapat jalan sepanjang 342 km. Pada akhir Rencana Pembangunan III telah dibangun jalan sepanjang 1.000 km dan sejumlah 533 km jalan-jalan sambungan yang sebelumnya tidak

dapat dilalui oleh kendaraan bermotor. Jalan-jalan raya lainnya yang berhasil dibangun ialah Rishi di perbatasan Benggala Barat, Jalepa di perbatasan Sikkim-Tibet, dan jalan antara Gangtok dan Natu La Pass di perbatasan Sikkim-Tibet. Kemudian terdapat pula jaringan-jaringan jalan raya ke wilayah Sikkim Timur. Jelas bahwa jalan-jalan raya tersebut sangat penting dalam menghubungkan tempat-tempat utama yang mempunyai arti strategis dalam mempertahankan wilayah Sikkim, sebelum pihak musuh dapat menyerbu langsung ke wilayah India. Pembangunan lainnya dalam bidang jaringan lalu lintas ialah sebuah jembatan tambang yang menghubungkan Gangtok dan Tehgu sepanjang 50 km, yang sangat penting dalam menunjang mobilitas angkatan bersenjata India dalam mempertahankan Sikkim. Kemudian patut pula diperhatikan Jalan Raya Sikkim Utara (North Sikkim Highway) yang dibangun dengan bantuan India menghubungkan Gangtok dengan Lachen dan Lach, yang juga merupakan urat nadi utama dalam mempertahankan wilayah Sikkim yang berbatasan dengan Cina. Sampai tahun 1972 Departemen Perhubungan Sikkim memiliki sejumlah 181 kendaraan yang dapat beroperasi pada jalan-jalan sepanjang 1.170 km.

Dalam pembangunan jembatan-jembatan yang juga merupakan urat nadi dalam perhubungan dapat dicatat: a) jembatan suspensi berharga Rupees 500.000 yang selesai dibangun tahun 1965 menghubungkan Kalimpong di Benggala Barat dengan Sikkim Barat di kota Malli, b) jembatan sepanjang 292 kaki di atas sungai Teesta menghubungkan jalan raya Sikkim-Namgyal dengan jalan raya Siliguri (India). Sebanyak 19 buah jembatan lainnya telah dibangun di seluruh wilayah Sikkim. Meskipun Sikkim tidak memiliki pelabuhan udara dan jalan kereta api, orang-orang dari Gangtok dapat langsung menuju ke stasiun kereta api di Siliguri (India), atau pelabuhan udara Bagdogra dengan jalan darat.

Pembangunan komunikasi lainnya ialah kantor pos dan telegrap, yang sebelum tahun 1950 hanya berjumlah tiga buah. Sekarang terdapat 9 kantor besar dengan 33 buah cabangnya di seluruh kerajaan Sikkim. Pembangunan dalam bidang pendidikan yang patut diketahui antaranya: 88 buah sekolah dengan 2.500 pelajar di Sikkim sebelum Rencana Pembangunan, dan pada akhir rencana pembangunan ketiga terdapat 191 Sekolah Dasar, 13 Sekolah di atas SD tetapi di bawah SMP, 7 SMP dan 5 SIA, sebuah Sekolah Umum, sebuah Sekolah Latihan, dan sebuah Sekolah keagamaan Buddha di kerajaan Sikkim. Di samping itu terdapat

4 buah pendidikan orang dewasa. Jumlah pelajar di pelbagai bidang pendidikan ialah sebanyak 15.000 orang. Di berbagai universitas di India terdapat 387 mahasiswa Sikkim yang belajar atas bea siswa India. Sejak tahun 1958 pemerintah India juga memberikan bantuan sebanyak satu juta Rupees untuk pembangunan Lembaga Namgyal untuk Kajian Tibet (Namgyal Institute of Tibetology) di Gangtok.

Demikianlah hasil-hasil positif dari kerjasama Sikkim-India yang tertuang dalam **Treaty** India-Sikkim tahun 1950, kemudian direalisasikan melalui Rencana-rencana Pembangunan sedari 1954-1971, dan 1971-1976 yang kini sedang berjalan. Melihat angka-angka tersebut sepintas lalu, maka dapatlah kiranya digambarkan bagaimana mendalamnya pengaruh India. Dengan demikian domain, range dan scope of power India terhadap Sikkim sangat intensif, sehingga sukar kiranya bagi Sikkim untuk memilih dalam bidang-bidang atau ruang-ruang manakah Sikkim masih dapat bergerak dengan bebas.

Meskipun wilayah Sikkim seluas 2.818 mil persegi itu terisolir oleh negara-negara tetangganya dan jauh dari laut, Sikkim mempunyai beberapa kekayaan yang cukup berharga. Jika semua kekayaannya tersebut telah dapat dilola sepenuhnya, maka hal itu tidak hanya akan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat Sikkim, tetapi juga akan dapat mengurangi bantuan ekonomi dari India. Namun isolasi Sikkim oleh India sedemikian ketatnya sehingga seolah-olah India adalah sebagai pengusaha dan pembeli tunggal dari hasil-hasil kekayaan Sikkim itu. Sepertiga dari luas wilayah Sikkim terdiri dari hutan, sehingga dengan sendirinya kayu-kayuan merupakan barang berharga bagi Sikkim. Di samping itu terdapat tanaman-tanaman dan pohon-pohonan hutan seperti: fir (pohon den), bambu, walnut, sal (sejenis pohon berharga di India), anggrek, dan tanam-tanaman yang mengandung obat-obatan. Seluruh hasil kayu-kayuan Sikkim dijual ke India untuk pembuatan bantalan jalan kereta api. Departemen Kehutanan Sikkim sedang melaksanakan konservasi tanah dan reboisasi hutan. Sebuah kebun teh percobaan telah dibangun di Sikkim Barat pada tahun 1966.

Sikkim juga kaya dengan potensi hydro-electric. Pada bulan Mei 1965 sebuah proyek hydro-electric di Rongnichu telah dapat diselesaikan, yang mampu memberi aliran listrik sebanyak 2.100 kw ke wilayah Gangtok dan sekitarnya. Sebuah micro-hydro-electric project Sikkim yang pertama diresmikan di Tanul pada bulan Nopember 1969. Alirannya disalurkan ke Pangan, sebuah kota di

Sikkim Utara, dan desa-desa sekitarnya. Micro-hydro-electric project kedua dibangun untuk daerah Rongli dan Rohtol. Sebuah hydro-electric project lainnya dengan kapasitas 12.000 kw telah mulai dikerjakan di Lagzip pada bulan April 1972.

Kerjasama India-Sikkim telah nampak pula dalam bidang-bidang kesehatan, di mana dokter-dokter tentara India juga ikut aktif membantu pelaksanaannya. Di bidang kegiatan lain antaranya perlu disebutkan: pembentukan Departemen Pertanian tahun 1955; Departemen Peternakan tahun 1954; Perusahaan Pertambangan Sikkim, sebuah joint-venture antara Pemerintah Sikkim dan India (1960), yang menggali barang-barang galian seperti tembaga, timah, dan seng dalam jumlah yang cukup besar. Hasil konsentrat timah tahunan dari tambang Bhotang ialah sebanyak 415,7 ton. Untuk menggalakkan kerajinan rakyat telah didirikan pula Lembaga Industri Kerajinan di Gangtok yang melatih orang-orang Sikkim. Pada tahun 1965 empat buah industri kerajinan rakyat dibangun di beberapa tempat di Sikkim dengan biaya sebesar Rupees 840,000 dari India. Indian National Council for Applied Economic Research telah melakukan feasibility studies untuk pembangunan industri kertas pulp di Sikkim.

II

Gejolak-gejolak politik yang terjadi pada tahun ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari peristiwa-peristiwa yang serupa pada tahun sebelumnya. Seperti telah diungkapkan terdahulu, setelah Raja Sikkim memegang kekuasaan, beliau selalu berusaha agar ikatan-ikatan dengan India berangsur-angsur dilonggarkan. Malahan kalau mungkin dilepaskan sama sekali. Namun setiap usaha Raja untuk melonggarkan ikatan Sikkim dengan India selalu mendapat reaksi negatif malahan kadang-kadang keras dari pihak India. Ada kalanya usaha-usaha tersebut diecap sebagai campur tangan asing dalam masalah-masalah dalam negeri Sikkim sendiri, yang pada hakikatnya adalah urusan India, meskipun pada tahun 1953 telah ditetapkan bahwa urusan dalam negeri dipegang oleh Raja sendiri dan urusan hubungan luar negeri oleh India. Kekhawatiran dan kecurigaan India terhadap adanya usaha-usaha asing untuk melepaskan Sikkim dari pengaruh India sedemikian rupa, sehingga India terpaksa mengadakan pembatasan perjalanan orang-orang asing ke wilayah Sikkim, terutama ditujukan kepada wisatawan-wisatawan Amerika. Hanya setelah mendapat

izin khusus dari Kementerian Luar Negeri India, wisatawan asing dapat mengunjungi Sikkim. Namun demikian, tidak sedikit wisatawan asing yang melanggar ketentuan ini, terutama warga negara Amerika Serikat, yang biasanya berakhir di dalam tahanan India.

Raja sendiri sangat maklum akan hal ini, tetapi keinginan untuk lepas dari pengaruh India tetap ada, terutama setelah Bhutan, negara tetangganya sebelah Timur, berhasil menjadi anggota penuh PBB pada tahun 1971, meskipun dalam bidang hubungan luar negeri dan pertahanan tetap dipegang India. Raja Sikkim sangat berhati-hati dalam sikapnya terhadap India, misalnya seperti yang diucapkan pada bulan Juni 1972, bahwa hubungan Sikkim yang utama dengan dunia luar hanyalah dengan India. Masih menjadi pertanyaan apakah pernyataan Raja Palden Thondup Wangyal dari Sikkim itu karena pengaruh ucapan Raja Bhutan terhadap India, yang antaranya mengatakan bahwa tidak ada perlunya bagi Bhutan untuk merubah/merevisi Treaty India-Bhutan tahun 1950. Sementara itu Raja Sikkim secara diam-diam telah menghimpun kekuatan politik dalam negeri untuk dapat menogang kekuasaan lebih besar dan mantap melalui jalan konstitusional yaitu melalui pemilihan umum. Pengambil-alihan jabatan Ketua Dewan Menteri dari pejabat senior India pada tahun 1972 merupakan langkah pertama dalam usaha menuju cita-cita Raja Sikkim.

Pemilihan umum untuk Dewan Negara yang dimulai pada tanggal 10 Januari 1973, telah berakhir dengan kemenangan Partai Nasional Sikkim, yang dapat dukungan dari pihak Raja. Insiden politik terjadi ketika penghitungan suara dimulai pada tanggal 29 Januari, di mana dua partai oposisi, yaitu: Partai Kongres Nasional Sikkim dan Partai Kongres Janata Sikkim menuduh Ketua Pemilihan mensabot jalannya pemilihan. Keadaan semakin memburuk ketika Ketua Partai Kongres Janata K.C. Pradhan ditahan pada tanggal 27 Maret dengan tuduhan menghasut keharmonisan rasial di Sikkim. Pada waktu Raja akan membuka Sidang Dewan Negara pada tanggal 20 Maret, partai-partai oposisi memboikotnya dan terjadi demonstrasi yang kemudian langsung menuju ke istana raja. Perundingan-perundingan dengan kaum oposisi dilakukan, di mana mereka menuntut dibebaskannya K.C. Pradhan, reformasi sistem pemilihan berdasar satu pemilih/orang satu suara. Tetapi perundingan tersebut tidak membawa hasil yang positif. Insiden-insiden selanjutnya terjadi di seluruh wilayah Sikkim antara pihak oposisi dan pengikut-pengikut raja, bahkan putra mahkota sendiri dituduh telah terlibat dalam penembakan terhadap

demonstran yang melukai tiga orang demonstran. Sementara itu kaum pengungsi Tibet juga dipersonjатаi oleh pihak pro-raja dan menyerbu demonstran. Kantor Perwakilan Politik India, R.S. Bajpai kebanyakan orang-orang yang berlindung, termasuk Kazi Londup Dorgi, Presiden Partai Kongres Nasional. Pemerintahan daerah di seluruh Sikkim praktis tidak berfungsi. Kalaupun kantornya masih utuh biasanya kosong atau diambil alih oleh anak buah partai-partai Kongres Nasional dan Kongres Janata.

Mengingat suasana yang semakin panas inilah maka baik Raja maupun pemimpin-pemimpin oposisi sama-sama meminta jasa-jasa baik Kementerian Luar Negeri India untuk melarai persengketaan tersebut. Atas dasar permintaan kedua belah pihak yang bersengketa maka pada tanggal 6 April tentara India memasuki Sikkim dan mengambil alih tiga buah pos polisi yang sebelumnya diserbu oleh perusuh-perusuh anti-raja. Perundingan-perundingan yang diadakan antara Pemerintah dan Joint Council of Action yang dibentuk oleh Kongres Nasional dan Kongres Janata terhenti pada tanggal 6 April, dan sebanyak 20.000 pengikut kedua partai oposisi mulai mengadakan demonstrasi lagi menuju ke Gangtok. Tetapi keadaan mereda setelah tentara India menguasai keadaan, kecuali di daerah-daerah luar ibukota yang tidak didatangi tentara India.

Sebagaimana halnya yang terjadi pada pemberontakan tahun 1949, maka untuk kedua kalinya India mengambil alih administrasi pemerintahan Sikkim atas permintaan Raja sendiri. Pemerintah India menunjuk B.S. Das (anggota Dewan Balakota Delhi-Delhi Municipal Corporation yang juga sebelumnya wakil India untuk Bhutan) yang kemudian diangkat oleh Raja sebagai Kepala Eksekutif (Pemerintahan) Sikkim. Pengangkatan tersebut telah mempunyai efek baik bagi para partai oposisi dan mereka memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk menghentikan agitasi-agitasinya.

Pada tanggal 11 April Sekretaris Kementerian Luar Negeri India, Kewal Singh tiba di Gangtok dan mulai mengadakan perundingan-perundingan dengan Raja dan pemimpin-pemimpin oposisi. Melalui Joint Council of Action pemimpin-pemimpin oposisi mengajukan 14 macam tuntutan untuk reformasi pemerintahan Sikkim, antaranya:

- 1) demokratisasi pemerintahan
- 2) pemilihan berdasarkan satu orang satu suara, dengan perlindungan semestinya terhadap kaum minoritas

- 3) badan peradilan yang bebas
- 4) penyelidikan terhadap adanya tuduhan penyalah-gunaan dana bantuan India dan penyalah-gunaan wewenang polisi
- 5) pengusiran pengungsi-pengungsi Tibet yang terlibat dalam kerusuhan-kerusuhan

Keempatbelas tuntutan tersebut merupakan suatu rancangan konstitusi sementara Sikkim yang akhirnya disetujui oleh raja. Pada tanggal 8 Mei 1973 Raja membubuhi tanda tangan pada rancangan tersebut bersama-sama dengan tanda tangan dari Kewal Singh, dari Komlu India, dan ketiga pemimpin partai politik Sikkim. Rancangan konstitusi sementara Sikkim itu dalam garis besarnya memuat hal-hal seperti berikut:

- 1) Pemilihan hanya oleh pemilih-pemilih yang telah dewasa berdasarkan prinsip: satu orang satu suara.
- 2) Pemilihan untuk Dewan Perwakilan diadakan setiap 4 tahun sekali di bawah pengawasan wakil Panitia Pemilihan India (Indian Election Commission) yang untuk maksud tersebut diangkat oleh Pemerintah Sikkim.
- 3) Dewan Perwakilan mempunyai kekuasaan untuk mengajukan perundang-undangan dan menerima resolusi-resolusi mengenai pendidikan, kesehatan masyarakat, bea-cukai, pers, pengangkutan, pasar, kehutanan, pekerjaan umum, pertanian, suplai bahan makanan, rencana sosial ekonomi, perumahan dan gedung-gedung, serta pajak tanah. Masalah-masalah seperti kedudukan raja dan anggota keluarganya, perkara-perkara yang belum diajukan ke pengadilan, pengangkatan kepala pemerintahan, anggota-anggota kehakiman, hubungan dengan Pemerintah India mungkin tidak akan dibicarakan di dalam Dewan.
- 4) Dewan Eksekutif akan terdiri dari anggota-anggota Dewan Perwakilan yang dipilih dan diangkat oleh Raja atas saran atau nasihat Kepala Pemerintahan (Eksekutif). Kepala Eksekutif akan mengetuai sidang-sidang.
- 5) Sistem pemilihan akan diatur sedemikian rupa sehingga berbagai anggota masyarakat akan mempunyai wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan secara semestinya. Jumlah dan komposisinya Dewan Perwakilan dan Dewan Eksekutif akan diatur dan disesuaikan setiap saat, sehingga tidak ada satu anggota masyarakat/penduduk yang memperoleh kekuasaan dominan, dan hak serta kepentingan setiap anggota masyarakat terlindung.
- 6) Raja akan melakukan tugasnya sesuai dengan syarat-syarat yang dicantumkan di dalam persetujuan.

- 7) Kepala Pemerintahan akan diangkat oleh Raja setelah ditunjuk oleh Pemerintah India.
- 8) Hal-hal yang bersangkutan dengan anggota Dewan Eksekutif, maka Kepala Eksekutif akan bertindak setelah mengadakan konsultasi dengan anggota-anggotanya. Ia (Kepala Eksekutif) akan mengajukan semua hal yang penting ke hadapan Raja untuk mendapatkan persetujuannya, kecuali jika keadaan memaksa untuk bertindak dengan segera, di mana ia harus mendapat persetujuan Raja secepat mungkin. Kepala Eksekutif mempunyai tanggung jawab khusus untuk menjamin pelaksanaan konstitusi dan administrasi negara. Jalannya administrasi negara yang efisien, jaminan hak-hak dasar warga negara, kebebasan semua warga negara, penggunaan dana-dana pembangunan ekonomi dan sosial untuk kepentingan rakyat. Jika seandainya terjadi hal-hal menyangkut harmoni kerjasama antara berbagai-bagai anggota masyarakat, pelaksanaan pemerintahan demokrasi dan administrasi pemerintahan yang efisien, perbedaan paham antara Kepala Eksekutif dan Raja, maka masalah-masalah tersebut akan diajukan kepada Pemerintah India untuk mendapat pertimbangan-pertimbangannya.
- 9) Jaminan hak semua warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Peradilan adalah bebas.
- 10) Gedung-gedung istana dan pengawal istana Sikkim tetap di bawah kekuasaan Raja.
- 11) Pemerintah India bertanggung jawab sepenuhnya atas pertahanan, keutuhan wilayah, hubungan luar negeri baik politik maupun ekonomi dan keuangan Sikkim. Pemerintah India akan melakukan tugas tersebut untuk kepentingan rakyat Sikkim dan keharmonisan masyarakat serta pembangunan administrasi serta sosial-ekonominya.

Demikianlah persetujuan-persetujuan yang dicapai dan berhasil dituangkan ke dalam Konstitusi sementara Sikkim yang telah ditanda-tangani oleh Raja, Wakil Pemerintah India dan ketiga pemimpin partai politik Sikkim. Patut diketahui pula bahwa pada tanggal 18 April partai-partai Kongres Nasional dan Kongres Janata sepakat untuk menggabungkan dan melebur partainya masing-masing, dan dalam pemilihan berikutnya mereka hanya akan ke luar dengan nama satu partai baru ialah Partai Kongres Sikkim¹.

¹ Sebagai Presiden Partai Kongres Sikkim terpilih Kazi Londhup Dorgi.

III

Keadaan di Sikkim setelah dicapai persetujuan dasar Konstitusi sementara itu boleh dikatakan normal kembali sampai menjelang diadakan pemilihan umum baru pada bulan April 1974. Partai Kongres Sikkim berusaha keras dalam kampanyenya menjelang pemilihan umum tersebut agar mereka dapat memenangkannya, sehingga dengan demikian rancangan Konstitusi itu segera dapat menjadi konstitusi permanen yang dapat secara kongkrit mencerminkan kehendak mereka. Tujuan mereka utama ialah pengurangan kekuasaan Raja seminimum mungkin, dan mengadakan kerjasama dengan India lebih erat lagi. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa sebagai partai yang mewakili golongan mayoritas di Sikkim, mereka ingin agar merekalah yang menguasai pemerintahan, dan bukan Raja yang berasal dari suku Bhutia yang hanya mewakili golongan minoritas rakyat Sikkim. Pemilihan berikutnya diadakan pada bulan April 1974 dengan mempergunakan sistem satu orang satu suara, yang jelas akan lebih banyak menguntungkan Partai Kongres Sikkim yang penganut-penganutnya sebagian besar terdiri dari orang-orang Sikkim keturunan Nepal, yang merupakan 70% lebih dari rakyat Sikkim. Pemilihan tersebut dimenangkan oleh Partai Kongres Sikkim dengan memperoleh sebanyak 31 kursi dari sejumlah 32 kursi yang diperebutkan. Partai Nasional Sikkim yang pro-Raja hanya memenangkan satu kursi, dengan demikian merupakan oposisi tunggal di Dewan Perwakilan¹.

Peranan India-pun sangat penting, tidak saja dalam usahanya melarai pihak-pihak yang bersengketa di Sikkim², tetapi juga dalam ikut campur secara langsung menformulir rencana Konstitusi Sikkim yang baru. Hasilnya seperti nampak kemudian akan lebih menguntungkan Partai Kongres Sikkim daripada golongan yang pro-Raja. Dalam hubungan pembuatan rancangan konstitusi inilah Raja Sikkim Polden Thondup Namgyal berusaha mengadakan perundingan-perundingan dengan pemerintah India di New Delhi, yang semula dimaksudkan untuk mencari jalan tengah. Pemerintah India kemudian menunjuk G.R. Rajagopaul, bekas Sekretaris Kementerian Kehakiman untuk membuat rancangan konstitusi Sikkim yang baru. Rancangan tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan

¹ Biasanya Ketua Partai yang menang juga dicalonkan menjadi Ketua Dewan Menteri.

² Selain hubungan luar negeri, pertahanan dan komunikasi, India juga dapat turut campur tangan langsung dalam masalah keamanan dan tertib hukum dalam negeri Sikkim, menurut interpretasi Treaty India-Sikkim tahun 1950.

Sikkim pada tanggal 11 Mei 1974 dalam bentuk Rencana Undang-undang. Rencana Undang-undang tersebut pada dasarnya hampir senada dengan persetujuan konstitusi sementara bulan Mei 1973 yang membatasi kekuasaan Raja, serta mempererat kerjasama antara Sikkim dan India. Pokok-pokok terpenting dari RUU tersebut ialah:

- 1) Menyerah-terimakan semua kekuasaan kepada Kepala Eksekutif yang dikepalai oleh orang India.
- 2) Membentuk Dewan Menteri yang bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan.
- 3) Mengurangi kekuasaan Raja dan hanya merupakan Kepala Negara tituler/lambang yang dibatasi oleh Konstitusi.
- 4) Untuk mempercepat pembangunan sosial, ekonomi dan politik Sikkim, akan diminta pada Pemerintah India untuk memasukkan Rencana Pembangunan Sikkim ke dalam Badan Perencana India (Indian Flanning Commission).
- 5) Jika diminta, India akan memberikan fasilitas-fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswa Sikkim untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan tinggi di India.
- 6) Pemerintah India akan memberikan kesempatan kepada warga negara Sikkim untuk menjadi pegawai negeri India.
- 7) Pemerintah Sikkim mungkin akan "meminta partisipasi" dan perwakilan rakyat Sikkim dalam lembaga-lembaga politik India.

Jika dilihat struktur administrasi konstitusi baru tersebut maka terdapat tiga jalinan tingkatan, yaitu Raja yang merupakan kepala negara yang dibatasi oleh konstitusi, sedangkan kekuasaan administrasi dibagi dua lagi. Pertama Dewan Menteri yang bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan dan Kepala Eksekutif yang ditunjuk oleh Pemerintah India dan kemudian diangkat oleh Raja. Yang menjadi keberatan terutama Raja ialah pokok nomor 7, di mana Pemerintah Sikkim meminta partisipasi dalam lembaga politik India, yaitu Parlemen. Menurut Raja pasal tersebut (dalam pasal aslinya ialah pasal 30c) akan menuju proses penyatuan Sikkim ke dalam negara India, dan dengan demikian identitas Sikkim sebagai negara akan hilang sama sekali. Raja menginginkan agar Sikkim tetap memelihara identitas sebagai negara yang terpisah dari India, yang sebetulnya sesuai dengan Treaty India-Sikkim tahun 1950. Jelas dari pokok RUU Konstitusi Sikkim tersebut melampaui persetujuan tanggal 8 Mei 1973. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Raja menolak dicantumkannya Sikkim dalam Konstitusi India, dan ia mencoba mengundurkan waktu untuk juga menolak persetujuan atas RUU tersebut. Pada

tanggal 15 Juni beliau menulis surat kepada PM Indira Gandhi yang mengatakan bahwa diperlukan waktu 10 hari untuk mempelajari Rencana Konstitusi tersebut. Pada tanggal 20 Juni ketika beliau akan menyampaikan amanatnya di muka sidang Dewan Perwakilan mengenai RUU Konstitusi tersebut sekelompok demonstran mencoba menghalang-halangi anggota-anggota Dewan Perwakilan untuk memasuki gedung. Partai Kongres Sikkim dan Pemerintah India menuduh bahwa para demonstran itu adalah orang-orang yang pro-Raja terdiri dari pengawal-pengawal istana, pegawai-pegawai istana serta keluarga raja. Raja menyangkal, dan mengatakan bahwa demonstran itu adalah spontan dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat termasuk pegawai negeri yang tidak setuju dengan RUU Konstitusi. Insiden antara para demonstran dan Polisi Cadangan Pusat India tidak dapat dihindarkan lagi, di mana menurut keterangan Raja polisi India itu memukuli demonstran dan menyemburkan gas air mata.

Meskipun demikian sidang Dewan Perwakilan akhirnya diadakan pada hari itu juga (20 Juni) yang dihadiri oleh 26 dari seluruh anggota yang berjumlah 32 orang. Semua anggota yang hadir secara aklamasi memberi persetujuannya atas RUU Konstitusi tersebut. Kemudian ditelorkan beberapa resolusi tambahan oleh Dewan Perwakilan yang antara lain berbunyi seperti berikut:

- 1) Bahwa Badan Perencana India (Indian Planning Commission) memasukkan Rencana Pembangunan Sikkim ke dalamnya serta mengikut-sertakan pejabat Sikkim ke dalam Badan itu.
- 2) Bahwa seorang Menteri Sikkim yang bersangkutan dengan pembangunan Sikkim atau deputy-nya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pembicaraan-pembicaraan dengan Dewan Pembangunan Nasional India (Indian National Development Council) atau badan-badan yang setaraf yang berhubungan dengan pembangunan Sikkim.
- 3) Bahwa Pemerintah India memberikan fasilitas-fasilitas khusus bagi mahasiswa-mahasiswa Sikkim.
- 4) Bahwa warga negara Sikkim yang memenuhi syarat dapat menjadi pegawai negeri India.
- 5) Bahwa rakyat Sikkim diberikan hak-hak dasar yang dijamin oleh Konstitusi India.
- 6) Bahwa Konstitusi India tersebut memuat bab-bab untuk amandemen.

Ketidak-puasan dari pihak Raja atas isi dan semangat dari Konstitusi baru itu telah mengakibatkan timbulnya demonstrasi-demonstrasi lagi antara pengikut-pengikut Raja dan anggota

partai Kongres Sikkim pada tanggal 21 Juni di Gangtok, dan keesokan harinya di luar ibukota. Reaksi negatif dari pihak Raja mungkin telah diharapkan oleh pihak partai Kongres Sikkim dan merupakan kesempatan baik bagi pemimpinnya untuk melancarkan aksi anti-Raja. Di hadapan masa demonstran yang berjumlah 10.000 orang, Kazi Londup Dorgi, Presiden Partai Kongres mengajukan resolusi yang sangat radikal yang antara lain berbunyi seperti berikut:

"Raja tidak pantas dan bukan orang yang sepatutnya untuk tetap memegang tugasnya sekalipun sebagai kepala negara konstitusional". Diserukannya agar, "Raja bekerja sama dengan kekuatan politik yang ada sesuai dengan persetujuan tanggal 8 Mei 1973 atau mengundurkan diri dari arena politik untuk selama-lamanya".

Kemarahan pihak Partai Kongres rupanya disebabkan pernyataan-pernyataan pers, ke dalam dan ke luar negeri yang diucapkan oleh Raja terhadap ketidak-sepakatannya akan konstitusi baru itu yang mau tidak mau akan menjuruskan Sikkim menjadi negara bagian India. Statemen-statemen Raja itu dianggap oleh Partai Kongres, tidak saja mengecilkan arti kemenangan mutlak partai Kongres sebagai partai yang berkuasa di Sikkim, tetapi juga disebut sebagai menyasarkan pendapat umum rakyat Sikkim, India dan dunia. Yang paling fanatik anti-Raja dan pro-India dari kalangan partai Kongres Sikkim ialah Seksi Kepemudaannya (Sikkim Youth Congress) yang juga menduduki 9 buah kursi di Dewan Perwakilan.

Dalam pada itu Raja terus mengadakan konsultasi dengan Pemerintah India di New Delhi. Kesempatan absennya Raja dari Gangtok telah dipergunakan oleh Partai Kongres untuk sekali lagi mengadakan sidang Dewan Perwakilan dan untuk kedua kalinya memberikan persetujuan penuh atas konstitusi baru pada tanggal 28 Juni. Selama di New Delhi Raja mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan Menlu Swaran Singh, Sekretaris Kemlu Kowal Singh pada tanggal 26 dan 27 Juni. Swaran Singh menasihatkan Raja agar ia dapat menyesuaikan dan mengakomodasikan dirinya dengan iklim politik baru di negaranya, serta menerima konstitusi baru yang telah mendapat dukungan wakil-wakil rakyat yang terpilih. Demikian juga pertemuan dengan Pt. Indira Gandhi, Raja telah diberi nasihat yang kurang lebih senapas dengan Menlu Swaran Singh, yaitu agar beliau mengikuti aspirasi-aspirasi rakyat Sikkim. Ditambahkan oleh Indira Gandhi, bahwa meskipun Raja hanya menjadi kepala negara tituler saja, masih

banyak peranan yang dapat dilakukan oleh beliau. Sementara itu Pemimpin partai Kongres, Kazi Londup Dorgi rupanya merasa jengkel atas tindakan Raja tersebut, sehingga ia perlu mengirim kawat yang satu ditujukan kepada Raja sendiri dan yang satu kepada Pemerintah India. Yang ditujukan kepada Raja berupa ultimatum agar Raja segera kembali ke Gangtok. Kawat yang ditujukan kepada Indira Gandhi dan Swaran Singh berisi peringatan agar pemimpin-pemimpin India jangan menghiraukan permintaan-permintaan Raja Sikkim tersebut. Seksi Kepemudaan dari Partai Kongres mengirim pesan pula kepada Indira Gandhi dengan diakhiri dua slogan yang sangat pro-India: "Long live India and its democratic principles" dan "Long live Indo-Sikkimese Unity".

Sekembalinya ke Gangtok Raja sebetulnya ingin mengadakan sidang Dewan Perwakilan untuk mengutarakan pendapatnya mengenai Konstitusi tersebut. Tetapi rupanya Partai Kongres yang menguasai Dewan Perwakilan menentangnya, kecuali jika Raja menyetujui konstitusi baru terlebih dahulu. Akhirnya Raja mengalah dan pada tanggal 4 Juli Raja membubuhkan tanda tangannya pada Konstitusi Sikkim yang baru tersebut disaksikan oleh Lewal Singh, sebagai wakil Pemerintah India, K.S. Bajpai Kepala Perwakilan Politik India di Sikkim, B.S. Das Kepala Eksekutif Sikkim dan seluruh anggota Dewan Perwakilan. Kazi Londup Dorgi atas nama para anggota Dewan Perwakilan mengucapkan terima kasihnya atas kesediaan Raja, dan mengharapkan bahwa dengan diundangkannya Konstitusi baru itu akan berakhirlah ketegangan dan konfrontasi antara berbagai pihak dan kesalah pahaman di dalam masyarakat Sikkim.

Sebagai Partai yang menang mutlak dalam pemilihan umum, maka Kazi Londup Dorgi, Ketua Partai Kongres Sikkim menjadi calon utama untuk memangku Ketua Dewan Menteri Sikkim. Sebelum peresmian jabatannya itu, rupanya Dorgi perlu mendapat nasihat-nasihat khusus dari India dan konsultasi-konsultasi lainnya, sehingga ia datang berkunjung ke New Delhi disertai 32 orang anggota Dewan Perwakilan Sikkim. Dalam keterangannya di New Delhi kunjungan "goodwill" tersebut juga dimaksudkan untuk menyatakan terima kasihnya kepada India yang telah "menyelamatkan demokrasi" Sikkim. Dalam pertemuan-pertemuan dengan pemimpin-pemimpin India antara lain PM Indira Gandhi, para anggota Dewan Perwakilan Sikkim mendapat jaminan PM Indira Gandhi bahwa identitas Sikkim sebagai negara akan tetap ada. Tetapi anggota-anggota Dewan Perwakilan Sikkim sendiri tidak memberi keterangan apapun mengenai jaminan identitas negara Sikkim tersebut.

IV

Sebagai negara yang mempunyai perbatasan darat yang luas dengan berbagai macam negara, terutama di bagian Utara, maka kepentingan India untuk menanamkan pengaruhnya di negara-negara pegunungan Himalaya tersebut sangat penting artinya. Negara-negara yang terletak di pegunungan Himalaya merupakan buffer-states terutama antara India dan Cina. Dalam masa damai mungkin pentingnya negara-negara perbatasan tersebut tidaklah begitu besar. Tetapi di masa perang atau sengketa, maka kedudukan buffer states akan sangat terasa untuk membendung sebarang musuh yang berupa kekuatan pisik, atau mengurangi arus infiltrasi musuh agar tidak secara langsung memasuki wilayah India.

Pada periode tahun limapuluhan di mana RRC dan India masih bersahabat baik, kedua belah pihak mengakui daerah pengaruhnya masing-masing. India mengakui kedaulatan penuh RRC atas Tibet, dan sebaliknya RRC mengakui pengaruh India atas Nepal, Sikkim dan Bhutan. Namun setelah persengketaan RRC-India meningkat menjelang tahun enampuluhan, Republik Rakyat Cina berusaha agar negara-negara pegunungan Himalaya tersebut lepas dari pengaruh India. Meskipun tidak diharapkan akan sepenuhnya pro-Peking, tetapi setidaknya mereka bebas dari genggamannya India. Demikian juga India berusaha secepat-koraksnya agar pengaruh Peking tidak sampai tertanam di negara-negara tersebut. Setelah Tibet dikuasai mutlak oleh Cina, maka negara-negara Himalaya seperti Nepal, Sikkim dan Bhutan bertambah meningkat arti strateginya bagi India. Intervensi India sedemikian rupa sehingga secara langsung atau tidak langsung ikut menggulingkan pemerintahan feodal Nepal di tahun 1950 dan digantikan oleh Raja yang lebih pro India. Tetapi RRC pun tidak tinggal diam, dan permulaan tahun enampuluhan Nepal sudah agak lepas dari pengaruh India, yang mengakibatkan berakhirnya samasekali Perwakilan Politik serta penempatan pos-pos militer Nepal oleh tentara India. Hubungan Nepal dan India kemudian dilaksanakan melalui hubungan diplomatik biasa.

Bagi negara-negara pegunungan Himalaya lainnya tidaklah mudah itu pengaruh India dapat disingkirkan. Bhutan dan Sikkim adalah merupakan negara mini jika dibandingkan dengan Nepal yang besarnya berlipat ganda dari wilayah Bhutan dan Sikkim. Dengan demikian sangat sukar bagi kedua negara Sikkim dan Bhutan, walaupun mereka ada keinginan untuk melonggarkan ikatan dengan India. Hanya Bhutanlah yang lebih berhasil untuk melepaskan ikatannya dengan India, dimana negara tersebut menjadi anggota PBB pada tahun 1971. Setelah Nepal dan Bhutan lepas ikatannya dengan India, maka tinggal Sikkimlah yang masih dapat dipegang oleh India. Rupanya India sangat khawatir, kalau seandainya Sikkim berhasil melepaskan ikatannya dengan India, maka

wilayah India Selatan (Benggala Barat dan Assam) akan terancam keamanannya. Dalam hubungan inilah rentetan-rentetan kejadian di Sikkim harus ditinjau.

Bagi orang yang bukan awam sangat sukar kiranya untuk menerima begitu saja ucapan dan alasan Menteri Luar Negeri India Swaran Singh, bahwa asosiasi negara Sikkim ke dalam negara India adalah kehendak murni wakil-wakil rakyat Sikkim sendiri, seperti diungkapkan dalam resolusi Dewan Perwakilan Sikkim pada tanggal 20 Juni 1974. Bagi India tentunya hal ini merupakan suatu keputusan politik yang penting, suatu peluang emas yang sukar dicarinya kemudian. Sebaliknya, jika seandainya Sikkim dapat dimasukkan ke dalam bahagian negara India sebagai associate State, maka akan sukarlah bagi Sikkim untuk keluar kembali. Sebagaimana pula tingkah laku negara-negara besar di dunia, maka alasan hubungan "saudara tua dan saudara muda" akan selalu dikemukakan oleh India dalam hubungannya dengan Sikkim.

Andaikata Parlemen India secara aklamasi atau dengan suara majoritas dapat menerima saran pemerintah India untuk memasukkan Sikkim ke dalam Konstitusi India sebagai negara asosiasi, maka hal ini akan mempunyai akibat pengaruh yang lebih luas terhadap politik internasional, dan terutama dalam hubungan negara-negara besar dengan negara-negara kecil. Dalih bahwa wakil-wakil rakyat Sikkim sendiri yang meminta negaranya dijadikan negara asosiasi dengan India akan merupakan preseden yang buruk, yang dikhawatirkan akan ditiru oleh negara-negara lainnya di dunia. Ingatan kita masih segar, bahwa serbuan tentara India ke Pakistan Timur misalnya, berdasarkan alasan bahwa Pemerintah Bangla Dosh sendiri meminta kehadiran tentara India di sana. Hal ini akan pula meningkatkan campur tangan yang lebih meluas dari negara-negara besar di anak benua India, misalnya RRC dan Uni Soviet.

Tindakan atau tingkah laku India selama tiga tahun terakhir ini, terutama campur tangan dalam perang Bangla Dosh, peledakan bom nuklir bawah tanah, serta memasukkan Sikkim sebagai negara asosiasi India telah banyak mengejutkan dunia pada umumnya, dan negara-negara tetangga pada khususnya. Sebagai negara tetangga yang paling dekat dengan India, jika dihitungkan jarak dari kepulauan Andaman dan Nikobar milik India dengan Sumatera sejauh kurang lebih 100 mil laut, maka Indonesia patut kiranya memperhatikan dengan seksama dan memberikan perhitungan yang lebih tepat terhadap tingkah laku India dalam politik internasional, baik dalam jangka dekat maupun dalam jangka jauh.

Pengantar

Rencana pembangunan pangkalan laut dan udara Amerika Serikat di pulau Diego Garcia di tengah-tengah Samudra Hindia, yang diumumkan pada tanggal 12 Maret 1974 dan anggarannya disahkan Senat pada tanggal 11 September 1974 ini, telah menimbulkan suatu perdebatan internasional dan mendapatkan perlawanan dari negara-negara Asia dan Afrika yang memperjuangkan agar Samudra Hindia menjadi suatu "zone damai". Perdebatan tersebut berkisar pada soal apakah pembangunan itu benar-benar suatu usaha Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan kekuatan militer Uni Soviet dan keuntungan strategis yang akan diperoleh Soviet dari pembukaan kembali Terusan Suez, atautkah suatu tindakan provokatif yang hanya akan memancing Uni Soviet untuk lebih meningkatkan kehadiran militernya dan secara demikian mengakibatkan suatu perlombaan persenjataan yang membahayakan keamanan dan perdamaian di kawasan itu. Perlawanan negara-negara di sekitar Samudra Hindia terhadap rencana pembangunan pangkalan itu bertolak dari asumsi, bahwa hal itu tidak hanya melanggar gagasan "zone damai", yang realisasinya diserukan di dalam resolusi Majelis Umum PBB tanggal 16 Desember 1971, tetapi juga akan meningkatkan perlombaan persenjataan dan ketegangan. Sebaliknya dengan persetujuan Kongres Amerika Serikat tersebut wakil-wakil rakyat Amerika Serikat membenarkan argumentasi Pentagon bahwa pembangunan itu adalah perlu untuk mengimbangi kekuatan militer Uni Soviet di Samudra Hindia dan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan minyak Amerika Serikat dan arus minyak bagi sekutu-sekutunya di Eropa Barat dan Jepang, yang merupakan soal mati hidup bagi negara-negara itu.

Karangan ini berusaha memberikan jawaban atas persoalan di atas dan secara berturut-turut membahas rencana pembangunan pangkalan Amerika Serikat di Diego Garcia, problematik strategi di Samudra Hindia, khususnya dari sudut pandangan kedua raksasa yang berlomba untuk mendapatkan keunggulan di kawasan itu, dan tanggapan negara-negara lain terhadap rencana itu. Sebagai penutup disajikan suatu evaluasi dan kesimpulan.

I. Rencana Pembangunan Diego Garcia

Rencana Amerika Serikat untuk meningkatkan pangkalan militernya di Diego Garcia dan kontroverse internasional yang diakibatkannya telah menarik perhatian dunia pada pulau itu dan persoalan yang timbul di sekitarnya.

Diego Garcia adalah pulau terbesar di kepulauan Chagos yang terletak di pusat Samudra Hindia, sekitar 742 km di sebelah Selatan kepulauan Maladewa dan 2.280 km di sebelah Utara Mauritius. Pulau itu diketemukan pelaut Portugis Diego Garcia pada tahun 1532. Pada abad ke-18 sejumlah orang Perancis menetap di situ, akan tetapi dalam peperangan Napoleon direbut oleh Inggris dan sejak itu diperintah dari Mauritius.

Sesudah Perang Dunia II, ketika Inggris melepaskan koloni-koloninya satu demi satu, pemerintah Inggris mengambil keputusan untuk membangun suatu pangkalan militer di kepulauan Chagos dan pulau-pulau Aldabra, Farquhar dan Desroches. Dengan maksud itu Chagos dibelinya dari Mauritius dan ketiga pulau lainnya dari Seychelles. Pada akhir 1965 semuanya itu disatukan menjadi "British Indian Ocean Territory", yang ditempatkan di bawah seorang Komisaris Inggris yang sekaligus juga menjadi Gubernur Seychelles¹.

Setahun kemudian Inggris dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan untuk bersama-sama membangun suatu pusat komunikasi militer di Diego Garcia, yang antara lain akan menghubungkan Pentagon dengan kapal-kapal selam Amerika yang beroperasi di Samudra Hindia. Sehubungan dengan itu orang-orang Amerika juga membangun suatu pelabuhan, suatu landasan untuk pesawat-pesawat pengangkut, tanki-tanki bahan bakar dan depot-depot spare parts serta perumahan untuk personil militer yang ditempatkan di situ. Sejak itu Diego Garcia berfungsi sebagai suatu relay station yang menghubungkan Pentagon dengan kapal-kapal perang Amerika yang bertugas di kawasan tersebut dan sebagai suatu pusat monitoring yang memonitor komunikasi militer Uni Soviet. Selain itu pesawat-pesawat patroli jarak jauh beroperasi dari pulau itu untuk mengamati gerak-gerik AL Soviet. Secara demikian Amerika Serikat dapat mengawasi hampir seluruh wilayah Samudra Hindia².

¹Cf. "British Indian Ocean Territory", dalam The Europa Year Book 1973: A World Survey, II (London, 1973), hal 220; Oskar Weggel, "Zur Lage im Indischen Ozean", dalam CHINA aktuell, Mei 1974, hal. 243.

²Cf. Robert Kaylor, "US upgrading Diego Garcia may mean increased tension", dalam The New Standard, 5 September 1974; Oskar Weggel, loc. cit., hal. 243.

Dengan biaya yang telah disetujui Senat, Pentagon akan membangun Diego Garcia lebih lanjut menjadi suatu pangkalan laut dan udara. Dengan maksud itu landasan udara akan diperpanjang dari 2,4 km menjadi 3,6 km, tempat parkir pesawat dan hangar diperluas, pelabuhan diperdalam dan diperluas, lebih banyak tanki minyak, depot spare parts dan perlengkapan perawatan akan dibangun. Dengan perluasan itu Diego Garcia akan dapat melayani setiap pesawat, termasuk pesawat pembom jarak jauh B-52, dan setiap kapal perang, termasuk kapal-kapal induk dan kapal-kapal selam peluru kendali Polaris dan Poseidon. Sebagai akibatnya jangkauan operasi AL dan AU Amerika Serikat di kawasan Samudra Hindia akan meningkat. Dari pos-pos patroli di Laut Arab, dengan peluru-peluru kendalinya kapal-kapal selam itu dapat mencapai sasaran-sasaran di Rusia Selatan dan bahkan Moskwa dan pusat-pusat industri Soviet di sebelah Timur Ural. Pesawat-pesawat B-52, yang ditempatkan di Diego Garcia, juga akan mudah mencapai sasaran-sasaran itu¹.

Diego Garcia memiliki sejumlah keuntungan, sehingga dapat dibangun menjadi suatu pangkalan militer yang dapat diandalkan. Pertama, di pulau itu sudah tidak ada penduduk sipil yang kelak akan dapat menuntut kemerdekaan. Penduduk sipil terakhir sudah dipindahkan oleh Inggris pada tahun 1971, ketika regu-regu bangunan Amerika Serikat tiba di pulau itu. Kedua, pulau itu telah memiliki suatu pusat komunikasi modern dan sejumlah fasilitas pertahanan, yang cukup luas, sehingga pembangunan selanjutnya tidak minta biaya terlalu banyak. Ketiga, Diego Garcia merupakan tempat berlabuh yang ideal. Pulau ini berbentuk tapal kuda dan laguna atau danau di antara kedua ujungnya itu adalah 13 km lebar, 24 km panjang dan sampai 30 m dalam, sehingga mudah menampung kapal-kapal besar. Panjang pulau adalah 60 km dan lebarnya antara 50 m dan 2 km. Akhirnya letak Diego Garcia adalah sangat strategis untuk mengawasi dan menguasai Samudra Hindia, khususnya Laut Arab dan kawasan Teluk Iran, serta jalur-jalur yang dilowati kapal-kapal tanki minyak. Diego Garcia bukanlah satu-satunya tempat berpijak Amerika Serikat, tetapi setelah dibangun lebih lanjut akan menjadi pangkalan militernya yang paling penting di kawasan itu².

¹Cf. Robert Manning, "Diego Garcia di mata Amerika Serikat", dalam Suara Karya, 30 Maret 1974, yang mengambilmnya dari Gemini; Robert Kaylor, loc. cit.

²Cf. Oskar Weggel, loc. cit., hal. 243-244; lihat juga Robert Kaylor, loc. cit.

II. Perlombaan di kawasan Samudra Hindia

Persetujuan Kongres Amerika Serikat mengenai rencana pembangunan Diego Garcia itu berarti, bahwa wakil-wakil rakyat membenarkan alasan-alasan yang diajukan Pentagon, bahwa pembangunan itu adalah perlu untuk mengimbangi kekuatan militer Uni Soviet di Samudra Hindia yang semakin besar dan dapat merubah perimbangan kekuatan secara yang merugikan Amerika Serikat, dan untuk mengamankan kepentingan-kepentingan minyak Amerika di Timur Tengah serta mengamankan saluran minyak ke Eropa Barat dan Jepang, yang merupakan soal mati hidup bagi negara-negara itu¹.

Kenyataannya, Uni Soviet kini mempunyai kedudukan yang cukup baik di kawasan Samudra Hindia. Dalam waktu cukup singkat negara itu berhasil membangun suatu kekuatan laut yang besar dan menempatkan sebagian di Samudra Hindia. Satuan-satuan AL-nya mulai memasuki kawasan itu pada tahun 1968 dan kini, enam tahun kemudian, jumlahnya telah meningkat menjadi sekitar 30. Biarpun belum mempunyai pangkalan laut sendiri, Uni Soviet telah berhasil mendapatkan hak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas pelabuhan di sejumlah negara kawasan itu, antara lain di Chittagong (Bangladesh), di Visha kapatan, Port Elair, kepulauan Mikobar dan Adaman (India), Um Qasr (Irak), Hodeida dan pulau Sokotra (Yaman Selatan), di Berbera dan Mogadishu (Somalia), di Mauritius dan Singapura (lihat peta)².

Selain itu Uni Soviet juga telah berhasil menjalin hubungan baik dengan berbagai negara di kawasan tersebut; antara lain Somalia, Yaman Selatan dan Irak, yang banyak mendapat bantuan baik ekonomi maupun militer, serta India. Dengan Irak dan India Uni Soviet bahkan telah mencapai suatu persetujuan persahabatan dan kerjasama, yang memperkuat kedudukannya di kawasan. Dengan bantuan ekonomi dan militer tersebut Uni Soviet tidak hanya berhasil mengikat negara-negara penerima bantuan tetapi juga sampai batas-batas tertentu menciptakan ketergantungan mereka. Lagi pula dalam proses itu Rusia dapat menempatkan sejumlah

¹Cf. Robert Manning, loc. cit.; Robert Kaylor, loc. cit.

²Cf. Soviet interest and influence in the Indian Ocean (Bangkok, 1971), hal. 10-17; Oskar Weggel, loc. cit., hal. 240; Newsweek, 12 Nopember 1973, hal. 15; lihat juga Antara, 11 Mei 1974, yang memberikan suatu ringkasan sebuah laporan PBB tertanggal 9 Mei 1974.

penasehat militer, sekitar 600 orang di Somalia, 500 orang di Yaman Selatan dan 1.000 - 1.200 orang di Irak¹. Di samping itu Uni Soviet mendapatkan hak atas fasilitas-fasilitas tersebut sebagai imbalan jasa-jasanya.

Pembukaan kembali Terusan Suez dalam waktu dekat ini juga akan memberikan suatu keuntungan besar kepada Uni Soviet. Untuk mencapai Samudra Hindia kapal-kapal perangnya tidak perlu menempuh jarak 17.000 km dari Laut Hitam lewat Tanjung Harapan atau 14.000 km dari Wladiwostok, tetapi cukup 3.500 km. Dengan demikian Rusia akan mudah meningkatkan kemampuan operasi militernya di Samudra Hindia dalam waktu yang singkat².

Semuanya itu dapat merubah perimbangan kekuatan antara kedua negara raksasa itu secara yang menguntungkan Uni Soviet. Negara-negara Barat mengikuti perkembangan itu dengan kecemasan dan mencari jalan untuk menanggapi dan mempertahankan perimbangan kekuatan semula³. Rencana pembangunan Diego Garcia dimaksudkan sebagai suatu langkah ke arah itu, biarpun ada pertimbangan lain, yaitu Amerika Serikat juga bermaksud melaksanakan ambisinya menjadi suatu kekuatan laut yang besar. Dalam hal yang terakhir ini kedua negara raksasa itu sependapat, karena juga Uni Soviet berambisi untuk membangun suatu angkatan laut yang dapat beroperasi di seluruh dunia. Selanjutnya pembangunan Diego Garcia itu juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan minyak⁴.

Perlombaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mendapatkan suatu keunggulan di Samudra Hindia itu terjadi karena keduanya menyadari bahwa kawasan itu mempunyai arti strategi yang besar. Dalam kondisi internasional sekarang ini negara yang berhasil mendapatkan supremasi di perairan itu sekaligus juga memiliki suatu keuntungan strategi global dan mampu menguasai jalur-jalur pelayaran yang memotongnya dan

¹Cf. Soviet interest and influence in the Indian Ocean, hal. 18-22; Oskar Weggel, loc. cit., hal. 240; Wynfred Joshua, Soviet penetration in the Middle East, (New York, 1971), hal. 22-27 dan 30-32.

²Cf. Richard Burt, "Verbal gunfire over US and Soviet roles in Indian Ocean", dalam Indonesian Observer, 13 Juni 1974; "West Europe too worries about the Indian Ocean", dalam The New Standard, 25 April 1974.

³Sampai 1969 Inggris menguasai Samudra Hindia. Amerika Serikat menempatkan 1 eskader di Bahrain dan kadang-kadang mendatangkan satuan-satuan armada ke-7 yang memerlukan 7 hari pelayaran. Mereka dapat menggunakan prasarana maritim Perancis (di Reunion dan Jibuti), Inggris, Iran dan Australia.

⁴Cf. Robert Manning, loc. cit.; Oskar Weggel, loc. cit. hal. 241.

pintu-pintu masuknya. Pada tataran politik kehadiran militer itu membuka jalan ke negara-negara kawasan itu dan memberikan suatu kemampuan untuk melakukan tekanan atas negara-negara itu.

Arti strategi Samudra Hindia itu terutama ditentukan oleh faktor-faktor penting berikut. Pertama, di samudra itu terdapat jalur-jalur pelayaran yang penting¹, yang menghubungkan Timur Jauh dengan Timur Tengah, Afrika dan Eropa. Dengan pembukaan kembali Terusan Suez dalam waktu dekat ini arti itu akan bertambah besar. Kedua, di kawasan Samudra Hindia itu terdapat sumber-sumber alam secara berlimpah-limpah seperti wol, rami, timah, karet, emas dan magnesium di samping sumber utama minyak, bahan bakar utama dan bahan mentah yang paling diperlukan peradaban industri kontemporer. Cadangan minyaknya adalah sekitar 60% cadangan minyak dunia dan produksinya kini merupakan sekitar 40% produksi dunia. Ketiga, di sekitar Samudra Hindia terdapat banyak negara yang padat penduduknya, yang kebanyakan sedang berkembang dan orientasi politiknya belum menetap, sehingga masih terbuka untuk gagasan-gagasan dan pengaruh dari luar. Antara lain karena pertimbangan-pertimbangan itu, seorang profesor pada Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat, Rocco M. Paone, menamakan kawasan Samudra Hindia itu sebagai "jantung dunia" (heartland of the world)².

Menurut Alfred Mahan, yang terkenal sebagai bapak dunia strategi maritim, hari depan dunia abad ke-21 akan ditentukan di perairan Samudra Hindia, yang dipandanginya sebagai kunci samudra-samudra lainnya. Dengan Halford Mackinder, seorang ahli strategi lain, selanjutnya dia berpendapat, bahwa barang siapa dapat menguasai Samudra Hindia akan dapat pula menguasai Asia³. Dengan demikian menjadi jelas mengapa kedua raksasa itu

¹80% kapal-kapal yang berlayar di Samudra Hindia adalah kapal-kapal negara Barat dan Jepang.

²Cf. Oskar Weggel, "Zur Lage im Indischen Ozean", dalam CHINA aktuell hal. 243-244; Robert Manning, loc. cit.

³Cf. Drs. Samuel Pardede, "Samudra Indonesia sebagai "Samudra Masa Datang", dalam Sinar Harapan, 18 Pebruari 1974; Soviet interest and influence in the Indian Ocean, hal. 9.

berlomba untuk menempatkan kekuatan militernya di kawasan itu yang sampai tahun 1967 dikuasai Inggris¹. Rencana pembangunan Amerika Serikat di Diego Garcia itu merupakan suatu puncak dalam perlombaan itu.

III. Tanggapan atas rencana Diego Garcia

Seperti sudah diketahui, rencana pembangunan Diego Garcia menjadi pangkalan militer Amerika Serikat telah menimbulkan suatu perdebatan internasional yang sengit dan reaksi keras banyak negara, khususnya negara-negara kawasan yang bersangkutan, termasuk Indonesia. Perdebatan itu pada dasarnya berkisar pada soal apakah pembangunan itu benar-benar suatu usaha untuk mengimbangi kekuatan militer Uni Soviet yang semakin meningkat di Samudra Hindia seperti yang dikemukakan Amerika Serikat, ataukah suatu tindakan provokatif yang pasti akan mendorong Uni Soviet untuk lebih meningkatkan kekuatan dan kegiatan-kegiatan militernya di kawasan itu dan secara demikian meningkatkan ketegangan serta bahaya konflik-konflik militer yang mengancam keamanan dan perdamaian².

Sekutu-sekutu Amerika Serikat, termasuk negara-negara Eropa Barat dan Jepang, umumnya membenarkan argumentasinya dan mendukung rencana pembangunan itu. Bahkan Inggris dan Perancis sendiri juga berusaha meningkatkan kekuatan militer mereka yang ditempatkan di Samudra Hindia dengan maksud yang sama. Merekapun melihat peningkatan kekuatan militer Soviet itu sebagai suatu ancaman bagi keamanan kawasan dan kepentingan-kepentingan minyak negara-negara Barat dan Jepang. Sampai Desember 1973 Inggris yang sebelum 1967 selama seabad lebih menguasai Samudra Hindia hanya menempatkan beberapa kapal perang dekat Beira di Mozambique dan di Saingapura. Kini terdapat kurang lebih 5 fregat dan beberapa kapal pembantu di

¹Mengenai perlombaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet itu lihat Hanson W. Baldwin, "The Indian Ocean Contest", dalam Times, 20, 21, dan 22 Maret 1972; George G. Thomson, Problems of strategy in the Pacific and Indian Oceans (New York, 1970), khususnya hal. 35-41.

²Cf. Robert Kaylor, "US upgrading Diego Garcia may mean increased tension", dalam The New Standard, 5 September 1974.

Samudra Hindia. Satuan-satuan AL itu dibantu oleh pesawat-pesawat RAF yang ditempatkan di Singapura dan di pulau Gan di Republik Maladewa, bekas jajahan Inggris. Beberapa kapal perang lainnya, termasuk kapal selam nuklir, akan segera menyusul. Selain itu, sebagai perluasan persetujuan tahun 1966 dan 1972 Inggris telah mencapai kesepakatan kata dengan Amerika Serikat untuk meningkatkan pangkalan di Diego Garcia untuk kepentingan pertahanan bersama. Juga AL Perancis telah meningkatkan kekuatannya di sebelah Timur Suez yang berpangkalan di Jibuti, yang terletak pada jalan masuk Samudra Hindia dan Laut Merah dan tidak jauh dari pulau Sokotra, pusat kebanyakan operasi militer Soviet¹.

Bahkan RRC, yang sukar disebut sekutu Amerika Serikat, menunjukkan banyak pengertian terhadap rencana pembangunan pangkalan Diego Garcia itu, biarpun untuk sebagian dipengaruhi juga oleh sikap anti Soviet-nya. Perlombaan yang berlangsung antara Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mendapatkan keunggulan di Samudra Hindia itu dilihatnya sebagai sangat membahayakan perdamaian dan keamanan di kawasan itu, tetapi Cina menilai rencana pembangunan Diego Garcia tersebut sebagai usaha Amerika untuk menanggapi kegiatan-kegiatan dan ambisi-ambisi politik Soviet. Rencana pembangunan itu di Peking tidak memancing suatu reaksi anti Amerika, tetapi suatu reaksi anti Soviet dan memperluas sengketa Cina-Rusia².

Sebaliknya rencana pembangunan itu mendapatkan perlawanan dari semua negara Asia dan Afrika yang menginginkan dan sejak tahun 1971 memperjuangkan agar Samudra Hindia menjadi "zone damai" yang bebas dari kekuatan militer negara-negara di luar kawasan. Dengan Srilangka sebagai sponsor utama sejumlah negara mengajukan suatu usul resolusi dalam sidang Majelis Umum PBB, yang pada tanggal 16 Desember 1971 diterima sebagai Resolusi Majelis Umum PBB No. 2832 (XXVI)³. Pada dasarnya resolusi itu menyerukan kepada negara-negara besar agar tidak memperluas kehadiran militernya di Samudra Hindia dan menarik semua pangkalan militer, termasuk pusat logistik dan penimbunan

¹Cf. Oskar Weggel, loc. cit., hal. 241-242; "Power East of Suez", dalam Newsweek, 12 Nopember 1973.

²Cf. Oskar Weggel, loc. cit., hal. 246-248.

³"The Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace".

senjata nuklir dan senjata pembunuhan massal lainnya. Seruan itu diulangi dalam sidang Majelis Umum tahun 1972, yang selanjutnya juga memutuskan untuk membentuk suatu panitia ad hoc yang ditugaskan mengambil langkah-langkah praktis dalam rangka realisasinya¹.

Dalam rangka itu pula pada tanggal 6 Desember 1973 Majelis Umum menugaskan Sekjen untuk menyusun suatu laporan lengkap mengenai persaingan kekuatan militer yang berlangsung di Samudra Hindia dan dianggap sebagai ancaman keamanan dan perdamaian. Laporan itu diterbitkan pada tanggal 10 Mei 1974 dengan judul "Pernyataan aktual tentang kehadiran pengaruh kekuatan-kekuatan militer raksasa di Samudra Hindia, khususnya dengan latar belakang perkembangan-perkembangan armada laut mereka sebagaimana tercantum dalam konteks persaingan kekuatan". Selain mengungkapkan fakta-fakta, laporan itu juga memuat kesimpulan bahwa kehadiran kekuatan Soviet di Samudra Hindia tidak merupakan ancaman nuklir bagi Amerika Serikat, dan bahwa sebaliknya Amerika Serikat mampu menukul Uni Soviet dengan peluru-peluru kendali nuklir dari kapal-kapal selamnya yang beroperasi di kawasan itu. Berbagai negara mengajukan protes bahwa laporan itu kurang teliti dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang salah. Sebagai hasilnya laporan direvisi dan pada tanggal 16 Juli 1974 diterbitkan dengan versi baru, yang lebih singkat dan membatasi diri pada fakta-fakta dan laporan-laporan resmi. Versi baru itu tidak menarik kesimpulan-kesimpulan dan tidak mengadakan spekulasi².

Akan tetapi Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak mengubris seruan resolusi tersebut dan meneruskan usaha mereka untuk meningkatkan kekuatan militer mereka di Samudra Hindia. Rencana pembangunan pangkalan Amerika Serikat di Diego Garcia merupakan suatu puncak perlombaan persenjataan itu. Sukar dikatakan siapa yang memulai eskalasi itu karena aksi dan reaksi saling menyusul dengan cepatnya dan merupakan suatu lingkaran setan. Akan tetapi karena proyeknya di Diego Garcia itu Amerika Serikat lebih banyak dikecam daripada Uni Soviet³.

¹Cf. Antara, 9, 12 dan 17 Pebruari 1974; Oskar Weggel, Loc. cit. hal. 244-245.

²Antara 11 Mei 1974 memuat suatu ringkasan Laporan PBB tertanggal 9 Mei 1974 dan Antara 16 Juli 1974 memberitakan versi barunya.

³Cf. Oskar Weggel. Loc. cit., hal. 245.

Protes yang paling keras datang dari India. Hal itu dapat dimengerti karena pada jarak 1.500 km di sebelah Selatan wilayahnya Amerika Serikat akan membangun suatu pangkalan laut dan udara untuk melayani kapal-kapal selam yang dengan peluru-peluru kendali nuklirnya dapat mencapai wilayah Uni Soviet, dan pesawat-pesawat pembom B-52 yang juga mampu mencapai sasaran yang sama. Juga Iran memperingatkan bahwa Samudra Hindia harus menjadi "zone damai" dan sehubungan dengan itu negara-negara besar asing harus menjauhkan diri. Indonesia menanggapi dengan menyatakan mengikuti perkembangan itu dengan keprihatinan. Malaysia menyatakannya, Srilangka, Bangladesh dan Selandia Baru memprotesnya¹.

Sehubungan dengan persoalan itu Australia mengambil sikap mendua. Dari satu pihak menyatakan menentang usaha-usaha Amerika Serikat untuk membangun suatu pangkalan di Diego Garcia, tetapi di lain pihak menyediakan banyak fasilitas bagi pertahanannya, antara lain di North West Cape, yang menghubungkan Pentagon dengan kapal-kapal selam yang beroperasi di Samudra Hindia, pusat logistik di kepulauan Kokos atau Keeling, dan pangkalan laut Cockburn Sound dekat Perth. Ada kemungkinan kata-kata protes itu hanya dimaksud untuk negara-negara kawasan itu, terutama Srilangka dan India².

Dalam persoalan ini Singapura mengambil sikap yang dapat dinilai sebagai realis. Biar pun menginginkan agar angkatan-angkatan laut negara-negara di luar kawasan meninggalkan Samudra Hindia, bertolak dari kenyataan bahwa negara-negara itu tidak bersedia menarik kekuatannya, sedangkan negara-negara kawasan tidak mampu mengusirnya, Singapura condong berpendapat, bahwa perairan itu bebas dimasuki kekuatan laut manapun agar tercapai suatu perimbangan kekuatan, yang justru merupakan perlindungan bagi kekuatan-kekuatan lemah dan jaminan perdamaian di kawasan. Sikap ini dianggap tidak bertentangan dengan seruan PBB agar Samudra Hindia menjadi "zone damai" karena perdamaian memang dapat diwujudkan atau dipertahankan dengan perimbangan kekuatan. Kenyataannya Singapura tidak termasuk negara yang menentang rencana pembangunan Diego Garcia³.

¹Ibid.

²Ibid.

³Antara 9 Mei 1974 mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Singapura di Jakarta.

IV. Evaluasi

Seperti diuraikan di atas perdebatan internasional sekitar rencana pembangunan Diego Garcia itu berkisar pada soal apakah pembangunan itu suatu usaha untuk mengimbangi kekuatan militer Uni Soviet di Samudra Hindia yang terus meningkat dan akan mendapatkan keuntungan besar dengan pembukaan Terusan Suez, atautkah suatu tindakan provokatif yang pasti akan mendorong Uni Soviet untuk lebih meningkatkan kekuatannya, dan secara demikian akan meningkatkan ketegangan dan mengancam perdamaian serta keamanan di kawasan itu.

Biarpun pembangunan itu mungkin akan memancing suatu eskalasi di pihak Uni Soviet dan meningkatkan perlombaan persenjataan di kawasan Samudra Hindia, dari indikasi-indikasi yang ada dapat ditarik kesimpulan, bahwa rencana pembangunan di Diego Garcia pada dasarnya adalah usaha Amerika Serikat untuk mempertahankan perimbangan kekuatan di kawasan tersebut yang terancam oleh peningkatan kekuatan militer Uni Soviet disertai dengan keuntungan strategis yang akan diperoleh Soviet dari pembukaan Torusan Suez dalam waktu dekat ini. Dalam rangka itu rencana tersebut juga dimaksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan minyak Amerika Serikat di Timur Tengah dan arus minyak dari kawasan itu ke Eropa Barat dan Jepang yang merupakan soal mati hidup bagi negara-negara itu. Apabila berhasil menguasai arus minyak itu, Uni Soviet akan dapat menundukkan negara-negara itu dengan mudah. Maksud lain ialah mencegah Uni Soviet memperoleh kemampuan untuk memasukkan negara-negara di sekitar Samudra Hindia ke dalam daerah pengaruhnya atau untuk menguasainya.

Amerika Serikat kiranya juga akan berhasil mencapai sasaran-sasaran tersebut. Pembangunan Diego Garcia menjadi suatu pangkalan laut dan udara, yang dapat melayani kapal-kapal perang Amerika Serikat, termasuk kapal-kapal anduk dan kapal-kapal selam peluru kendali nuklir, dan pesawat-pesawat pembom raksasa jarak jauh B-52, akan dapat memulihkan perimbangan kekuatan yang berubah dengan meningkatnya kekuatan militer Uni Soviet di Samudra Hindia dan pembukaan Torusan Suez. Dengan perkataan lain Amerika Serikat akan dapat mempertahankan perimbangan kekuatan di Samudra Hindia yang menguntungkannya. Seperti kita lihat di atas jangkauan operasi laut dan udaranya akan meningkat secara tajam. Baik kapal-kapal selam nuklir maupun pesawat-pesawat B-52 akan dapat mencapai Moskwa dan pusat-pusat industri di sebelah Timur Pegunungan Ural.

Berkat kekuatannya yang baru itu Amerika Serikat juga akan mampu melindungi kepentingan-kepentingan minyaknya di Timur Tengah dan mengamankan arus minyak dari kawasan itu ke negara-negara sekutunya di Eropa Barat dan Jepang. Selain itu Amerika juga akan mampu mencegah Uni Soviet memperluas daerah pengaruhnya di kawasan Samudra Hindia yang sangat penting itu, dan bahkan dinamakan "jantung dunia" (heartland of the world) oleh seorang profesor Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat. Sebagai akibatnya, akan terjamin pula kestabilan politik dan perdamaian di kawasan itu yang akan menguntungkan negara-negara yang bersangkutan¹. Sejarah menunjukkan bahwa perimbangan kekuatan umumnya akan mempertahankan keamanan dan perdamaian.

Dengan pembangunan Diego Garcia itu Amerika Serikat memang mengambil suatu risiko eskalasi perlombaan persenjataan di Samudra Hindia dan protes serta perlawanan negara-negara di kawasan itu, akan tetapi risiko itu kiranya dapat dipertanggung-jawabkan karena tujuannya adalah vital bagi perimbangan kekuatan yang menjamin keamanan dan perdamaian.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan kiranya dapat dikatakan, bahwa di satu pihak rencana pembangunan Diego Garcia itu dapat disesalkan, terutama karena mengandung risiko eskalasi perlombaan persenjataan di kawasan Samudra Hindia yang diperjuangkan agar menjadi suatu "zone damai". Kita dapat mengerti reaksi-reaksi negatif negara-negara Samudra Hindia, termasuk Indonesia, yang antara lain menyatakan mengikuti perkembangan itu dengan keprihatinan. Adalah ideal kawasan itu bebas dari kekuatan militer negara-negara besar asing dan konflik-konflik yang dapat terjadi sebagai akibatnya.

Akan tetapi di lain pihak, sebelum keadaan itu terwujud - kemungkinan itu sangat kecil kalau ada - dapat diterima kehadiran kekuatan militer kedua negara raksasa yang seimbang. Bertolak dari asumsi bahwa Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak

¹Cf. Agus Sujito, "Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Masalah Diego Garcia sebagai pangkalan militer AS", dalam Kompas, 15 Maret 1974.

akan menghormati resolusi Majelis Umum PBB No. 2832 yang menyerukan penutupan semua pangkalan militer asing, kita dapat membiarkan pembangunan Diego Garcia menjadi suatu pangkalan laut dan udara Amerika Serikat. Kita bahkan dapat menyambutnya dengan baik. Selama Uni Soviet tidak menarik kekuatan militernya dari Samudra Hindia, kehadiran kekuatan militer Amerika Serikat yang tangguh adalah jaminan kemerdekaan, keamanan dan kestabilan kawasan itu, termasuk bagi Indonesia. Paling tidak kita dapat menunjukkan suatu pengertian atas pertimbangan-pertimbangan yang mendasari rencana pembangunan itu.

ASPEK-ASPEK SECURITY DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL DI SAMUDRA INDONESIA

O. Abdul RACHMAN

Pendahuluan

Samudra Indonesia tidak seluas seperti Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Perbedaan lebih menyolok lagi, kalau dibandingkan bahwa baik di Atlantik maupun di Pasifik terdapat negara-negara industri raksasa, sedangkan di sekitar Samudra Indonesia mayoritas negara terdiri dari negara-negara berkembang, yang memproduksi bahan-bahan mentah yang diperlukan oleh negara-negara industri di Atlantik dan di Pasifik. Kebanyakan negara-negara berkembang baru menjadi merdeka pada dekade 1950 dan dekade 1960, sehingga pemerintah-pemerintah negara-negara di sekitar Samudra Indonesia terlibat dalam usaha-usaha pembangunan yang ternyata menghadapi macam-macam persoalan yang menghambat pelaksanaan pembangunan.

Persoalan-persoalan yang menghambat timbul baik karena macam-macam krisis di negara-negara industri, maupun karena kelemahan dan kepekaan yang terdapat dalam konstelasi dalam negeri sendiri.

Ulasan berikut bermaksud membuat beberapa catatan mengenai berbagai persoalan yang banyak bersangkutan dengan aspek-aspek security, dan yang membawa pengaruh pada hubungan internasional dari keadaan Samudra Indonesia dan wilayah-wilayah sekitarnya.

I. Pengembangan Istilah Security

Sebagai catatan pertama kiranya baik menyelami paham security itu sendiri, sehingga kita akan dapat memperoleh gambaran mengapa security menjadi salah satu masalah penting di Samudra Indonesia.

Manusia -baik secara individu maupun dalam kelompok, di zaman pra-sejarah maupun seperti sekarang dalam wadah negara

kebangsaan, selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya.

Setiap bangsa mempunyai cita-cita yang luhur dan indah yang ingin dicapainya. Indonesia memiliki Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan cita-cita bangsa untuk zaman abadi dan merupakan landasan idiil untuk mencapai tujuan nasionalnya.

Usaha untuk mencapai tujuan nasional tadi merupakan strategi nasional, yang dalam pelaksanaannya menemui dan menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang semuanya harus ditanggulangi, dengan kekuatan, kemampuan, ketekunan, ketrampilan dan keuletan yang dimiliki oleh bangsa tersebut.

Tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan merupakan aspek-aspek security yang seyogyanya harus diperhitungkan baik dalam bentuknya, maupun dalam kekuatan yang menimbulkan aspek-aspek security tadi.

Secara universal, security berarti freedom from danger, fear or attack, atau dalam bahasa Indonesia, keamanan berarti bebas dari bahaya, ketakutan atau serangan. Persepsi satu negara mengenai aspek-aspek security berbeda dengan persepsi yang dimiliki oleh negara lain. Hal yang merupakan bahaya untuk satu negara belum tentu dipandang sebagai bahaya oleh negara lain. Dalam rangka hubungan internasional, usaha satu negara untuk mencapai suasana keamanan, usaha untuk dapat hidup bebas dari bahaya, ketakutan dan serangan, dapat menimbulkan perasaan tidak aman pada negara lain yang kemudian juga melakukan usaha untuk meningkatkan keamanannya terhadap negara pertama. Usaha negara kedua untuk meningkatkan keamanannya itu oleh negara pertama dapat ditanggapi sebagai ancaman, sehingga merasa perlu untuk melaksanakan perang terhadap lawannya. Ini adalah kenyataan yang pernah terjadi, dan yang sekarang terjadi pula.

Satu contoh dari sejarah yang belum lama lampau, adalah permusuhan antara Jerman dan Perancis yang tiga kali memuncak dalam bentuk perang, pada tahun 1870, 1914-1918 dan akhirnya antara 1939-1945.

Setelah menderita kekalahan pada tahun 1870, Perancis merasa tidak aman, karena takut bahwa Jerman pada satu hari akan menyerbu kembali. Perasaan tidak aman tadi dibakar dengan penghinnaan yang dirasakan sewaktu Jerman sebagai pihak yang menang menggunakan Istana Versailles, kebanggaan bangsa Perancis, untuk mendikte syarat-syarat perdamaian. Di samping itu Istana Versailles dijadikan tempat untuk memproklamkan negara kesatuan

Jerman dengan menobatkan Raja Prusia sebagai Kaisar Wilhelm I. Sampai akhir abad XIX kehidupan bangsa Perancis oleh pemerintah-pemerintah yang silih berganti dibina dalam suasana kekalahan. Selalu dianjurkan agar bangsa Perancis tetap waspada terhadap bahaya dari Jerman. Baru pada permulaan abad XX suasana pasif berubah menjadi semangat ofensif. Perubahan kondisi mental dirumuskan oleh ahli filsafat Henri Bergson yang dalam karyanya mengembangkan teori mengenai *elan vital*, tekad yang tidak kunjung padam, tekad yang dapat mengatasi semua kesulitan yang dihadapi. Bangsa Perancis sadar bahwa kekuatan strategisnya kurang, bila dibandingkan dengan kekuatan Jerman, baik dalam jumlah penduduk, maupun dalam kualitas dan kuantitas produksi industri. Akan tetapi kondisi mental bangsa Perancis yang ingin menghapuskan rasa terhina pada tahun 1870 diperkuat dengan teori Bergson. Dalam bidang strategi militer dirumuskan rencana-rencana operasi untuk mengalahkan Jerman dengan jiwa ofensif, *attaquez - toujours attaquez* - serang, serang terus, demikian diajarkan di sekolah-sekolah militer Perancis. Doktrin militer mencakup pengertian bahwa ofensif tetap harus dilakukan, walaupun dengan pengorbanan unsur manusia yang besar.

Doktrin ofensif Perancis teruji pada pertempuran di Sungai Marne pada tahun 1914. Rencana strategi Perancis untuk membalas dendam terhadap Jerman bertujuan untuk menyerbu ke dalam kerajaan Jerman melalui pegunungan Vogesen langsung ke jurusan Berlin. Rencana strategis Perancis dihadapi oleh rencana strategis Jerman yang bermaksud menyerbu Perancis melalui Belgia dan kemudian melalui tanah datar di bagian Utara Perancis. Markas besar tentara Jerman menyediakan 6 minggu untuk mengalahkan tentara Perancis.

Karena kemampuan komando dan infrastruktur Jerman lebih unggul, maka rencana strategi Jerman dapat mendahului operasi-operasi Perancis. Penyerbuan Jerman dalam waktu singkat sudah sampai di Sungai Marne, yakni garis pertahanan Perancis yang hanya terletak beberapa kilometer dari kota Paris. Jendral-jendral Jerman sudah hidup dalam suasana kemenangan. Namun pasukan-pasukan Perancis dengan gigih tetap melakukan serangan-serangan ofensif terhadap tentara-tentara Jerman. Banyak sekali kesatuan-kesatuan Perancis dihancurkan oleh artileri dan tembakan-tembakan Jerman. Tiap kali markas besar Perancis mengirimkan kesatuan-kesatuan lain. Akhirnya serangan Jerman dapat dihentikan. Perang Dunia I berlangsung empat tahun, jauh lebih lama daripada waktu enam minggu yang direncanakan oleh markas besar Jerman. Kekalahan Jerman pada tahun 1918 sebenarnya sudah mulai pada tahun 1914 di pertempuran di Sungai Marne.

Kekalahan Jerman pada tahun 1918 menimbulkan kondisi mental bangsa Perancis yang pasif. Dalam bidang strategi militer pembentukan Garis Maginot, rangkaian benteng-benteng di perbatasan Timur dipandang cukup untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan serangan dari Jerman. Dalam kehidupan masyarakat makin timbul mentalitas masa bodoh di kalangan rakyat banyak, yang disebabkan karena perpecahan dan pertentangan antara partai-partai politik, sehingga semangat elan vital tidak terdapat lagi di Perancis.

Sebaliknya bangsa Jerman yang hidup dalam mentalitas kalah dan perasaan hina, oleh Hitler beserta Partai Nasional-Sosialis diorganisir sebagai satu kesatuan tekad untuk dapat membalas dendam terhadap Perancis. Dalam usaha untuk mencapai dan meningkatkan kesadaran bangsa Jerman maka digali teori-teori dari ahli-ahli filsafat Jerman seperti Schopenhauer, Hegel dan Nietzsche untuk memupuk harga diri bangsa Jerman sebagai Ras Aria yang berhak mempertuan seluruh dunia. Pelaksanaan teori-teori Ras tadi, menimbulkan reaksi di seluruh dunia. Perang Dunia I hanya langsung melibatkan negara-negara Jerman, Austro-Hongaria pada satu pihak dan Perancis, Inggris, Rusia dan Amerika Serikat pada lain pihak. Perang Dunia II melibatkan seluruh dunia. Akibat Perang Dunia II di benua Eropa terjadi pembagian Jerman yang menjadi Republik Federasi Jerman dan Republik Demokrasi Jerman. Permusuhan antara Perancis dan Jerman yang selama 80 tahun mengganggu kestabilan benua Eropa dan di seluruh dunia berakhir, dan digantikan dengan perang dingin antara dunia bebas dan dunia komunis. Contoh hubungan Perancis-Jerman digantikan dengan pola superpowers, yang kisahnya sampai ke masalah Samudra Indonesia.

Di Eropa dan di Samudra Atlantik didirikan NATO sebagai persekutuan strategis militer negara-negara Barat untuk menghadapi ancaman yang dirasakan karena ekspansi blok komunis yang tersusun dalam Pakta Warsawa.

Dalam rangka NATO Amerika Serikat memberikan bantuan untuk membangun kekuatan-kekuatan strategis negara-negara Eropa Barat yang harus dibangun dari kehancuran yang diderita selama Perang Dunia II. Walaupun titik berat NATO diletakkan pada segi strategis militer, namun bantuan Amerika Serikat memungkinkan negara-negara Eropa Barat bangun kembali terutama dalam segi perekonomian. Walaupun masih berlaku ikatan NATO dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan rasisa, pada permulaan dekade 1960-an dibentuk Masyarakat Bara dan Baja - Coal and Steel Community yang diprakarsai oleh pemimpin-pemimpin dari Jerman dan Perancis. Coal and Steel Community ini kemudian diperluas menjadi Pasaran Bersama Eropa -

European Economic Community, dan berkembang menjadi kesatuan ekonomi yang makin lepas dari dominasi Amerika Serikat.

Paralel dengan perkembangan di Eropa Barat, maka di Eropa Timur didirikan COMECON, persekutuan di bidang ekonomi dari negara-negara Eropa Timur. Perkembangan COMECON di bidang ekonomi pesat sekali, walaupun belum mencapai tingkatan dari PEE. Peningkatan hidup bangsa-bangsa di benua Eropa, baik di Barat maupun di Timur, mengalihkan fokus kondisi mental bangsa-bangsa Eropa dari aspek-aspek security yang tadinya dominant, ke arah perkembangan ekonomi masing-masing negara.

Kedua superpowers Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mencapai imbangan strategis di benua Eropa. Di bidang kemiliteran imbangan strategis berupa workable deterrent; setelah kedua superpowers bertali-kali mengadakan challenge and response, walaupun masih pada tingkat demonstrasi dengan kekuatan nuklir strategis, nuklir taktis dan dengan kekuatan militer konvensional. Di Samudra Indonesia belum tercapai imbangan antara kedua superpowers; justru imbangan kedua superpowers itu sedang berada di dalam proses pembentukan.

II. Sistem Senjata Teknologi dan Sosial

Dalam hubungan internasional dipergunakan kekuatan nuklir, konvensional dan kekuatan non-konvensional, dalam pengertian gerilya sampai dengan terror yang belakangan ini dipergunakan dalam operasi hy-jacking kapal-kapal terbang.

Kekuatan nuklir sedianya hanya dimiliki oleh anggota-anggota klub nuklir yang terdiri dari Amerika Serikat, Soviet, Inggris, Perancis dan RRC. Diperkirakan bahwa pada dekade 1970-an RRC akan menguasai delivery system - sistem penembakan untuk IRBM. Dalam lingkungan klub nuklir terdapat imbangan antara Amerika Serikat beserta Inggris dan Perancis pada satu pihak, Soviet pada pihak kedua dan RRC sebagai pihak ketiga. Kapasitas Amerika dan Soviet jauh melebihi kapasitas Inggris, Perancis dan RRC. Kapasitas nuklir Inggris dan Perancis dipandang sebagai pelengkap kapasitas Amerika, akan tetapi kapasitas dan kemampuan RRC timbul sebagai penggancang imbangan terror yang berlaku antara kedua superpowers.

Tiba-tiba pada bulan Mei 1974 India melodakkan kekuatan nuklir sebesar 10 kiloton, yang telah menimbulkan reaksi keras, terutama pada tetangganya Pakistan. Di samping itu terdapat

perlombaan antara Amerika dan Perancis untuk memperlengkapi Israel dan Mesir dengan tenaga nuklir. Iran akan mengembangkan tenaga nuklir dengan reaktor-reaktor Perancis. Kemampuan untuk mengembangkan tenaga nuklir, yang segera dapat dirubah menjadi alat perang, sebenarnya dimiliki oleh negara-negara industri, seperti Jepang, Israel, dan mungkin Afrika Selatan.

Kekhawatiran timbul bahwa bom nuklir kecil, yang ternyata relatif mudah dapat diproduksi, dapat dipergunakan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan terror.

Dalam bidang perang konvensional, maka detente di benua Eropa, menghasilkan perlombaan antara produsen-produsen persenjataan konvensional untuk menjual barang-barangnya ke wilayah-wilayah di luar Eropa. Industri persenjataan merupakan komponen ekonomi yang sangat berharga bagi perekonomian negara yang mempunyai industri persenjataan. Pertimbangan ekonomi terutama, menghasilkan penjualan senjata oleh Perancis dan Inggris kepada Afrika Selatan, walaupun Afrika Selatan sejak 1963 oleh PBB telah dikutuk karena politik rasialismenya. Penjualan kapal terbang Mirage kepada Libya, juga oleh Perancis, menggoncangkanimbangan kekuatan yang ada antara pihak Israel dan Arab,imbangan mana dipelihara oleh Amerika dan Soviet. Kenaikan harga-harga minyak telah menimbulkan keinginan negara-negara Arab di Teluk Persia untuk membeli senjata-senjata modern. Teknisi untuk persenjataan modern diperlengkapi oleh Pakistan.

Perang konvensional di negara-negara berkembang masih juga terjadi, misalnya di Nigeria untuk menumpas gerakan separatisme Biafra. Divisi-divisi di bawah Jendral Gowon dari pemerintah pusat Nigeria menghadapi dan bertempur dengan divisi-divisi Biafra di bawah Jendral Oyukwu, sesuai dengan ajaran-ajaran taktik yang pernah dipelajari dari buku-buku taktik di sekolah-sekolah militer Inggris. Perang antara Israel dan Arab memperlihatkan keadaan sama. Begitupun halnya dengan perang antara India dan Pakistan, baik pada tahun 1965 di Rann of Kutch, maupun pada tahun 1972 waktu divisi-divisi India mengalahkan divisi-divisi Pakistan di Pakistan Timur yang kemudian menjadi Bangladesh. Perlu dicatat juga bahwa pada tahun 1962 perang antara RRC dan India, juga dapat digolongkan dalam kategori perang konvensional yang dipergunakan oleh kedua belah pihak dalam hubungan internasionalnya.

Sejak dulu perang gerilya sudah dikenal. Kata gerilya dipergunakan pertama kali di Spanyol, waktu rakyat Spanyol dalam gerombolan-gerombolan kecil menyerang, menghadang dan kadang-kadang

dapat menghancurkan pasukan-pasukan Napoleon. Juga di bagian-bagian lain di dunia pernah diadakan perang gerilya, perang non-konvensional. Akan tetapi baru dengan periode kemerdekaan negara-negara berkembang di Asia dan Afrika, perang gerilya dikembangkan menjadi senjata yang dipergunakan oleh pihak yang lemah terhadap pihak yang kuat. Perjuangan gerilya, seperti terjadi di Burma, di Indonesia, di Vietnam dan sekarang di daerah yang pernah dikuasai Portugal, seperti di Guinea-Bissau, dan Mozambik, mencapai sukses karena:

- ada pimpinan yang dapat menggalang persatuan dan kesatuan antara semua golongan masyarakat selama berlangsung perjuangan kemerdekaan, sehingga motivasi perjuangan dihadapkan sebagai kebulatan tekad bangsa terhadap penjajah.
- dalam organisasi gerilya dari pimpinan pusat melalui saluran-saluran komando kepada tingkat bawah, karena menghadapi kekurangan-kekurangan di segala bidang, maka sarana-sarana perang gerilya baik di bidang persenjataan maupun di bidang sosbud dan sospol menghasilkan inovasi bukan saja dalam pelaksanaan bahkan juga dalam pengembangan pengetahuan dan pengertian mengenai istilah strategi.

Penggolongan dalam penggunaan senjata pada tingkat nuklir, konvensional dan gerilya dapat ditambah dengan peperangan antara kekuatan yang berkapasitas nuklir dan konvensional yang besar sekali yang menghadapi kekuatan gerilya yang terutama didorong oleh motivasi yang kuat. Perang Vietnam menggambarkan bahwa Amerika Serikat dengan kapasitas persenjataan raksasa tidak dapat mengalahkan Vietnam Utara, Vietkong yang kapasitasnya jauh lebih rendah. Bantuan Amerika Serikat kepada Republik Vietnam Selatan jauh melebihi bantuan yang diterima oleh Vietnam Utara dan Vietkong dari Uni Soviet dan RRC.

Situasi tersebut di atas ikut memberi warna kepada Samudra Indonesia. Detente yang berlaku antara kedua superpowers di benua Eropa tidak berlaku di kawasan Samudra Indonesia. Waktu perang dingin sedang menghebat pada dekade 1950-an, maka Amerika Serikat sebagai pusat dunia bebas menyusun beberapa pakta-pakta militer untuk membendung ekspansi komunis. Di samping pembentukan NATO di benua Eropa, maka di Samudra Indonesia disusun SEATO untuk Asia Tenggara, Bagdad pact yang kemudian menjadi CENTO di Timur Tengah. Untuk memantapkan koordinasi antara semua pakta-pakta militer disusun jaringan telekomunikasi melalui beberapa stasiun telekomunikasi di beberapa tempat-tempat strategis

seperti di Asmara (Ethiopia), Diego Garcia, Kepulauan Cocos, Pulau Gan dan fasilitas-fasilitas telekomunikasi di Australia bagian Barat.

Sebaliknya Uni Soviet tidak berhasil menyusun pakta pertahanan di kawasan Samudra Indonesia. Usaha Soviet lebih ditonjolkan pada segi-segi non-militer, seperti dalam bidang kebudayaan, diplomasi dan bantuan ekonomi. Terdapat perjanjian-perjanjian bilateral antara Soviet dengan negara-negara komunis di Asia, seperti RRC, Mongolia, Korea Utara dan Vietnam Utara.

Pada umumnya negara-negara berkembang di sekitar Samudra Indonesia tidak menyetujui konsepsi security dari Amerika Serikat maupun pendekatan-pendekatan Soviet yang mempergunakan segi-segi non militer akan tetapi pada hakekatnya masih merupakan lanjutan dari perang dingin. Posisi dan jawaban negara-negara berkembang ini dirumuskan dalam konperensi Asia Afrika di Bandung dan kemudian pada konperensi-konperensi non-aligned di Belgrado dan di Kairo pada tahun 1960 dan 1961. Semua ini masih merupakan latar belakang dari pihak-pihak tersebut di dalam kebijaksanaan masing-masing mengenai kedudukan Samudra Indonesia.

III. Sejarah

Baik juga membuat sedikit penelitian historis tentang Samudra Indonesia ini. Sejarah menceritakan bahwa Samudra Indonesia sejak dahulu merupakan sarana perhubungan antara negara-negara sekitar Samudra Indonesia dan dengan kerajaan Cina. Perdagangan dengan kapal-kapal berlaku antara pelabuhan Canton melalui Selat Malaka dengan pelabuhan-pelabuhan yang terletak di kepulauan Indonesia, di Semenanjung India, di Teluk Persia, di Laut Merah dan di pantai Timur Afrika. Bahwa perdagangan antara bangsa-bangsa Asia pada waktu itu juga mempergunakan kekerasan senjata dapat dibuktikan bahwa pelabuhan Canton pada tahun 758 dihancurkan oleh armada Arab.

Kehadiran kapal-kapal Cina (RRC) yang sekarang menimbulkan kekuatiran di negara-negara anti komunis, sebenarnya tidak merupakan barang baru di kawasan Samudra Indonesia.

Dinasti Sung Selatan dari 1127 sampai 1279 mengirimkan armada-armada ke arah Selatan melalui Selat Malaka ke Samudra Indonesia. Dinasti Yuan 1279 - 1368 yang tersohor karena Kaisar Kublai Khan mengirimkan armada-armadanya untuk meminta upeti

dari raja-raja di luar perbatasan kerajaan Cina. Pada tahun 1281 dikirim ekspedisi ke Jepang; pada tahun 1282 dan 1287 ekspedisi dikirim ke Champa dan ke Anam. Pada 1292 armada Cina menghadap kepada Raja Majapahit dan menuntut agar Raja Majapahit untuk menyatakan kesetiaannya. Pujangga sejarah Cina menceritakan bahwa Raja Majapahit menolak tuntutan Cina, bahkan Duta Cina dipotong hidungnya oleh penguasa-penguasa Majapahit. Penghinaan terhadap Duta Cina menimbulkan amarah Kublai Khan yang memutuskan untuk mengirimkan ekspedisi ke pulau Jawa untuk "mengajar" Raja Majapahit. Kegagalan misi diplomatik diikuti dengan kegagalan ekspedisi militer.

Dinasti Ming 1369 - 1433 merupakan puncak ekspansi Cina di Samudra Indonesia. Sejak tahun 1405 sampai dengan 1433 tujuh armada dikirim untuk menuntut upeti dari Raja-raja di kawasan Indonesia dan Samudra Indonesia. Tempat-tempat yang dikunjungi terletak di pulau Jawa, kepulauan Maladive, Kalikut, Sri Lanka, Ormuz di Teluk Persia, Aden dan Mogadishu di Laut Merah dan Malindi, Kilwa dan Barawa di pantai Afrika Timur¹.

Kehadiran armada-armada Cina di kawasan Indonesia dan di Samudra Indonesia membawa dampak besar pada stabilitas negara-negara pada waktu itu. Diceritakan bahwa Raja Malaka yang menguasai lalu lintas pelayaran di Selat Malaka datang di Peking untuk minta perlindungan karena takut terhadap kerajaan Thai di Utara dan kerajaan Demak di Selatan. Malaka diberi perlindungan dan dapat berkembang menjadi pelabuhan transit dari perdagangan antara kerajaan Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di sekitar Samudra Indonesia. Peranan Malaka dapat bertahan sampai 1511 waktu Malaka diduduki oleh Portugal.

Setelah tahun 1433 kerajaan Cina mengisolir diri dan sejak itu lenyaplah kehadiran armada-armada Cina. Pujangga-pujangga sejarah kerajaan Cina selalu mencatat jumlah kapal dan orang yang diberangkatkan pada ekspedisi-ekspedisi berturut-turut. Misalnya ekspedisi pertama dari dinasti Ming terdiri dari 63 kapal dengan 27.800 orang. Ekspedisi ketiga terdiri dari 48 kapal dengan 30.000 orang. Ekspedisi-ekspedisi Kublai Khan sebelumnya juga mengirimkan ekspedisi-ekspedisi besar seperti terjadi waktu dinasti Ming. Walaupun kapal-kapal Cina sudah

¹ Auguste Toussaint - *Histoire de l'Océan Indian*, hal. 76 berikut. Presses Universitaires de France 1961.

mempergunakan kompas, namun dapat diperkirakan bahwa armada-armada besar Cina menderita kerugian-kerugian karena badai-badai tropis yang dahsyat, karena pertempuran seperti terjadi di pulau Jawa pada tahun 1292 atau mungkin karena penyakit-penyakit. Sejak akhir abad XIII sudah tercatat ada perkampungan-perkampungan Cina misalnya di Kalimantan bagian Barat, di sungai Musi yang kemudian menjadi sarang bajak laut. Baru pada tahun 1405 laksamana bajak laut Cina di Palembang ditangkap oleh armada dinasti Ming yang membawa "laksamana" ke Peking untuk dipenggal. Penduduk-penduduk Cina memperisterikan wanita-wanita setempat.

Periode Cina berakhir dan pada permulaan abad XVI ^{awal} mulai periode penjajahan dari Barat, sampai pertengahan abad XX.

Armada-armada Cina terutama bertugas untuk moyakinkan raja-raja di Selatan dan di sekitar Samudra Indonesia tentang kebebasan singgasana, semacam politik mercu suar, karenanya tidak pernah dimaksudkan untuk menetap di satu tempat.

Berlainan sekali peranan Barat. Tujuan utama armada-armada Barat adalah untuk mencari komoditi-komoditi yang diperlukan untuk masyarakat-masyarakat di benua Eropa. Portugal sebagai bangsa Eropa pertama yang datang di perairan Samudra Indonesia, dapat mempertahankan hegemoni dan dominasi dari tahun 1503, waktu Albuquerque menjadi Gubernur Jendral pertama sampai permulaan abad XVII, waktu Belanda dan Inggris mulai mendesak Portugal. Strategi maritim Portugal yang dirumuskan oleh Albuquerque, mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Menentukan satu tempat strategis untuk dijadikan pusat kekuasaan Portugal. Untuk ini dipilih Goa di semenanjung India.
- b. Pembentukan benteng-benteng atau sitadel-sitadel di semua tempat-tempat strategis untuk menjaga lancarnya perdagangan.
- c. Mengadakan perjanjian-perjanjian dengan raja-raja atau syah-bandar setempat demi kepentingan dagang.

Baik Belanda dan kemudian Inggris pada permulaan mengikuti pola strategis maritim Portugal. Belanda mula-mulanya memilih Banten sebagai pusat kekuasaannya, kemudian pindah ke Jakarta yang selanjutnya disebut Batavia. Inggris memilih Bombay sebagai pusat pemerintahan. Rangkaian benteng-benteng atau sitadel yang didirikan pada permulaannya tidak ditujukan terhadap ancaman-ancaman dari raja-raja setempat, bahkan benteng-benteng yang merupakan kantor dagang yang diperkuat didirikan untuk

menghadapi usaha-usaha dari kekuatan-kekuatan Barat yang dalam saingan juga ingin berdagang di wilayah yang sama.

Setelah Portugal lenyap dari sebagian besar wilayah Samudra, dan hanya tinggal di Mozambique, Goa, Macao dan Timor Dilly, maka kekuasaan Belanda dan Inggris yang tadinya hanya di beberapa tempat saja, meluas menjadi jajahan-jajahan besar.

Masih menjadi pertanyaan bagaimana armada-armada kecil dari Eropa dapat menghadapi kerajaan-kerajaan sepanjang pantai dan berhasil mengembangkan kekuasaannya sampai menjadi daerah jajahan yang luas.

Ada yang mengatakan bahwa kapal-kapal dari Eropa lebih unggul dalam pertempuran-pertempuran di laut karena mempunyai sistem layar yang dapat memanfaatkan angin, walaupun angin datang dari jurusan yang berlawanan. Selanjutnya kapal-kapal Eropa dipersenjatai dengan meriam-meriam yang dapat menembak pada jarak jauh.

Ada yang mencari jawaban terhadap pertanyaan tadi di bidang sosial budaya. Armada-armada Eropa, karena mula-mulanya datang untuk berdagang, oleh raja-raja atau syahbandar setempat diterima sebagai pedagang di antara pedagang-pedagang Asia lainnya. Akan tetapi dengan ketrampilan dagang dan ketrampilan diplomasi yang ditulis dalam perjanjian-perjanjian dengan penguasa-penguasa setempat, yang di antaranya selalu mencakup fasal bahwa pihak pedagang Eropa akan memberi bantuan kepada pihak kerajaan terhadap layannya memperkuat posisi pedagang-pedagang Eropa. Faktor "bantuan" kepada raja setempat terutama oleh Belanda dan Inggris ditangani dengan sukses, sehingga akhirnya Belanda dan Inggris di wilayah jajahan masing-masing bertindak sebagai wasit yang bersenjata kalau terjadi pertentangan antara satu raja dengan raja lain, bahkan bila terjadi pertentangan di dalam kerajaan mengenai perebutan mahkota antara fraksi-fraksi bangsawan di dalam kerajaan itu.

Bantuan yang diberikan oleh Belanda dan Inggris selalu dibayar dengan konsesi-konsesi yang memperbesar kekuatan, kekuasaan Belanda dan Inggris dan mengocilkan, mengurangi kekuatan dan kekuasaan raja-raja di Asia.

Periode penguasaan Eropa Barat terhadap kawasan Samudra Indonesia sejak semula sampai akhir zaman penjajahan pada pertengahan abad XX ditandai dengan mencari dan memperoleh komoditi-komoditi yang diperlukan untuk perkembangan masyarakat di Eropa.

Mula-mulanya usaha dagang dipusatkan pada perdagangan rempah-rempah. Kemudian dengan terjadinya revolusi industri pada abad XIX maka komoditi yang diperlukan adalah hasil perkebunan seperti karet, sisal, kopi dan hasil kehutanan. Demikianlah maka kawasan-kawasan di sekitar Samudra Indonesia secara historis sudah selalu terlibat di dalam arus kekuatan-kekuatan.

IV. Komoditi-komoditi

Baiklah membuat sedikit gambaran tentang komoditi-komoditi di negara-negara di kawasan Samudra Indonesia. Rempah-rempah, terutama cengkeh yang pernah menjadi komoditi utama dalam perdagangan di Eropa, pada waktu sekarang tidak menempati posisi kuat lagi. Bahkan cengkeh, yang berasal dari Maluku, sekarang sudah disebarkan ke wilayah-wilayah lain. Misalnya di Zanzibar dan di Madagaskar, lepas pantai timur Afrika, cengkeh menjadi komoditi ekspor dan penghasil devisa, karena cengkeh diimpor ke Indonesia.

Di sekitar Samudra diproduksi karet, terutama di Sri Lanka, Muangthai, Malaysia dan Indonesia. Lebih dari 90% perdagangan karet alam berasal dari empat negara tadi. Walaupun di samping karet alam diproduksi karet sintetis, namun kebutuhan akan karet alam masih menguntungkan negara-negara produsen karet alam.

Jute, kenaf dan abaca yang diproduksi di India, Bangladesh dan Thailand dapat juga bertahan harga. Akan tetapi cotton dan wol mengalami penurunan harga, yang sangat mempengaruhi ekonomi India, dan Mesir.

Pupuk melonjak harganya, karena melonjaknya harga minyak bumi; ditambah dengan meningkat kebutuhan akan pupuk. Walaupun begitu FAC di Roma mengumumkan bahwa negara berkembang yang terdiri dari 70% penduduk dunia, hanya memakai 15% dari keperluan pupuk sedunia. Diperkirakan bahwa diperlukan 30.000 juta dollar untuk diinjeksikan di produksi pupuk agar dapat menjamin kebutuhan dunia akan makanan.

Beras, walaupun Asia dari dulu merupakan produsen beras, namun eksplosi penduduk, ditambah dengan gangguan keamanan di beberapa negara, telah menjadi sebab-sebab negara-negara berkembang perlu mengimpor beras dari Amerika Serikat dan Canada. Harga beras pada tahun 1973 dan 1974 melonjak tinggi.

Hasil pertambangan antara lain biji besi di Australia dan Vietnam Utara. Batu bara di Australia, India dan RRC. Timah di Indonesia, Malaysia, Muangthai dan Australia. Nikel di Australia dan Indonesia. Hasil kehutanan berupa kayu, terdapat di Filipina, Malaysia dan Indonesia. Harga-harga tinggi yang tercapai pada tahun 1973 sangat menurun pada tahun 1974. Minyak bumi, terutama diketemukan di Timur Tengah dan di Asia Tenggara. Walaupun minyak juga terdapat di Amerika Latin, di Amerika Utara, di Afrika Barat dan di Afrika Utara, namun produksi minyak di Timur Tengah beserta cadangan jauh melobiki produksi sumber-sumber lain. Walaupun kenaikan harga minyak ditangani oleh OPEC, namun ternyata bahwa negara-negara produsen - bukan anggota OPEC, turut menaikkan harga minyaknya, seperti misalnya Soviet, Amerika Serikat dan Canada. Dipkirakan bahwa konsumsi minyak bumi dalam 10 tahun mendatang akan meningkat dua kali. Pun pula diperkirakan bahwa Amerika Serikat dalam jangka waktu itu akan meningkatkan impor dari Teluk Persia, karena produksi di benua Amerika - termasuk produksi di Alaska tidak dapat ditingkatkan.

Kenaikan harga minyak oleh OPEC menonjolkan interdependensi dunia dalam rangka ketergantungan negara-negara industri dari sumber-sumber minyak, lebih lagi karena kebutuhan akan minyak akan naik dua kali dalam 10 tahun yang akan datang.

Hasil gemilang OPEC merupakan dorongan untuk negara-negara berkembang agar dengan bahan-bahan mentah lain juga dapat tercapai persatuan antara produsen-produsen bahan-bahan mentah supaya bersama-sama menghadapi para konsumen.

Sudah jelas bahwa negara-negara berkembang akan melanjutkan usahanya untuk dapat mencapai harga-harga lebih tinggi untuk hasil-hasil produksinya, namun kesatuan tekad negara-negara berkembang sulit tercapai, karena perhitungan masing-masing negara masih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berlainan dan berbedabeda. Yang perlu kita catat adalah bahwa masalah komoditi ternyata telah melahirkan pola pertemuan kekuatan-kekuatan di wilayah sekitar Samudra Indonesia. Untuk segi security kenyataan itu perlu dipertimbangkan.

V. Eksplosi Penduduk, Makanan dan Masalah Energi

Di sekitar Samudra Indonesia terletak negara-negara dengan jumlah penduduk yang besar. India dengan 500 juta, Indonesia 130 juta, Pakistan lebih kurang 50 juta, Bangladesh 80 juta. Ditambah dengan jumlah penduduk negara-negara lain di sekitar Samudra, maka jumlah penduduk melebihi 900 juta manusia. Terkecuali Afrika Selatan, Australia dan mungkin Iran, negara-negara lain semua merupakan negara berkembang, yang semuanya menghadapi dua persoalan besar, yaitu bertambahnya penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan makanan.

Persoalan penduduk dan makanan merupakan persoalan yang cukup gawat, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1974 mengadakan UN Population Conference di Bukaros pada bulan Agustus dan UN World Food Conference di Roma pada bulan Nopember. Walaupun kedua konperensi dihadiri oleh delegasi-delegasi dari segenap penjuru dunia, namun kedua konperensi lebih menonjolkan perdebatan-perdebatan politik sehingga tidak tercapai konsensus mengenai penyelesaian yang diperlukan.

Sedangkan angka-angka statistik yang dikumpulkan oleh PBB, mendesak sekali agar diketemukan penyelesaian mengenai masalah penduduk dunia dan kebutuhan akan makanan. Sekarang saja, tiap Minggu ada 10.000 orang mati kelaparan. Tiap hari jumlah penduduk bertambah dengan 200.000 jiwa, artinya tiap tahun ada tambahan 75 juta. Diperhitungkan bahwa pada tahun 2000 penduduk dunia akan berjumlah 7.000 juta manusia. Untuk benua Asia diperhitungkan bahwa pada tahun 2000 penduduknya berjumlah lebih dari 4.000 juta, lebih kurang dua pertiga dari jumlah penduduk dunia, Indonesia pada tahun itu akan mempunyai 250 juta.

Kira-kira sepuluh tahun yang lalu, negara-negara berkembang di Asia, yang tidak termasuk blok komunis, mengharapkan bahwa "revolusi hijau" dengan bibit unggul padi akan menghasilkan panen yang lebih besar. Akan tetapi, karena melonjaknya harga minyak bumi, dengan sendirinya melonjak juga harga pupuk yang diperlukan untuk bibit unggul tadi. Tambah lagi dengan bencana-bencana alam yang telah menimpa Pakistan, India, Bangladesh, Indonesia dan Pilipina, yang menghancurkan panen dan mengacaukan rencana-rencana pembangunan, karena belum dapat diperhitungkan akan ada bencana alam sorta akibat-akibatnya. Pada World

Population Conference di Bukares, Agustus 1974, diperbincangkan "basic demographic problems, their inter-relationship with economic and social development, and the population policies and action programmes needed to promote human welfare and development".

Konsep-konsep konperensi mendapat tantangan dari delegasi-delegasi Afrika dan Amerika Selatan, dari Vatikan, dari RRC dan dari beberapa negara sosialis. Berkata delegasi RRC antara lain: "We have learned from our own experience that it is wrong and far from the truth to say that over-population is the main cause of the poverty and backwardness of developing countries ... and that a population policy is decisive in solving the problem of poverty and backwardness". Perdebatan sengit hampir menimbulkan deadlock, sehingga konperensi hanya menghasilkan resolusi lunak.

Konperensi berikutnya di Roma, adalah United Nations World Food Conference, yang sebenarnya merupakan pelengkap dari World Population Conference di Bukares. Kurang berhasilnya konperensi Bukares merupakan pertanda bahwa konperensi di Roma kurang memuaskan akhirnya.

Kebanyakan negara-negara berkembang mencari penyelesaian dengan mendesak negara-negara kaya, terutama Amerika Serikat dan Canada, untuk melanjutkan dan meningkatkan peranannya sebagai negara pemberi bantuan. Berkata antara lain wakil India: "the problem could be solved if the rich would allocate to the poor larger proportions of their wealth".

Ada juga diperbincangkan di Roma, agar dibuat semacam "food-box", yang dapat menjadi tempat pengumpulan makanan dari negara-negara kaya untuk kepentingan negara-negara miskin. Namun konperensi Roma tidak membawa "jawaban" yang dicari untuk persoalan-persoalan yang dihadapi negara-negara miskin.

Bahkan, ada beberapa teknokrat, ahli-ahli ekonomi, mulai memperbincangkan "triage solution" terhadap negara-negara miskin. Menurut Webster Dictionary, triage berarti sorting out - memilih. Hal ini pernah ditangani waktu Perang Dunia I, di Perancis. Karena begitu banyak korban, maka di rumah-rumah sakit militer Perancis, diadakan pilihan antara golongan yang luka ringan, golongan yang luka parah dan golongan yang lukanya masih dapat diobati. Golongan yang luka ringan tidak diobati lagi, karena diperhitungkan akan sembuh sendiri. Moroka yang luka parahpun tidak diobati karena toh akan mati. Hanya moroka yang luka-lukanya masih dapat diobati diberi perawatan.

Mungkin para teknokrat sudah merasa putus asa, karena semua "paper-paper" yang dipersiapkan tidak dapat dilaksanakan karena tantangan-tantangan politis, seperti ternyata dalam perdebatan-perdebatan sengit, baik di Bukares, maupun di Roma, mungkin juga, karena statistik-statistik demografi memang menghancurkan optimisme yang diperlukan. Ambillah kasus India. Bila India melanjutkan tambahan penduduk dengan 2,5% setahun, maka pada tahun 2000, penduduk India akan lebih besar jumlahnya daripada penduduk PBB. Untuk memberikan pendidikan, perumahan dan perawatan medis, maka menurut ukuran-ukuran PBB, tiap hari selama 25 tahun harus dibangun 1.000 ruangan sekolah baru, 1.000 ruangan rumah sakit dan 10.000 rumah. Ditambah dengan kebutuhan makanan yang ditentukan sebanyak 100 kg beras atau gandum per kapita¹. Uraian ini sekedar untuk memberi gambaran bahwa masalah penduduk dan masalah pangan akan merupakan faktor determinan di dalam soal security bagi negara-negara di sekitar Samudra Indonesia itu.

Semua negara-negara berkembang menghadapi persoalan yang sama, yalah bagaimana mencapai imbalan antara tambahan penduduk yang pesat pada satu pihak dengan meningkatkan GNP. Di beberapa negara tercapai growth sebanyak 5%, akan tetapi bila dikurangi dengan tambahan penduduk sebanyak 3%, maka real growth hanya sampai 2% setahun.

Melonjaknya harga minyak bumi menimbulkan situasi baru dalam dunia ekonomi internasional dan sebagai akibatnya situasi politik internasional merubah pandangan yang pernah menggolongkan negara-negara dunia dalam golongan kaya, maju dan golongan negara-negara berkembang. Bechtoldt² berpendapat bahwa situasi baru harus diukur dengan nilai apakah sesuatu negara mempunyai cukup keuangan untuk membiayai supply energi atas dasar efisiensi di bidang ekonomi. Dengan mempergunakan ukuran nilai tadi maka negara-negara industri juga terbagi dalam dua golongan. Amerika Serikat, karena sampai sekarang belum tergantung sepenuhnya pada impor minyak bumi dan Republik Federasi Jerman karena mempunyai surplus ekspor yang besar sekali, merupakan dua negara industri yang mampu menghadapi krisis energi. Inggris, Perancis, Italia dan Jepang terpaksa mengadakan pinjaman uang untuk menjamin supply energi yang diperlukan.

¹ Asia 1975 Year book - Far Eastern Economic Review Population: The People Plague, hal. 58 dst.

² Heinrich Bechtoldt - The Diktat of the Oil millions, Aussen Politik Vol. 25 No. 3/74. hal. 303 dst.

Negara-negara berkembang dapat dibagi dalam empat golongan. Negara-negara produsen minyak sejak tahun 1974 memang menerima banyak uang sebagai akibat melonjaknya harga-harga minyak bumi. Namun di antara negara-negara produsen minyak terdapat negara-negara dengan penduduk sedikit seperti Libya, Kuwait, Bahrain, Emir-emir di Teluk Persia dan Arab Saudi. Ada negara-negara produsen minyak dengan jumlah penduduk yang besar seperti Aljazair, Nigeria, Iran dan Indonesia. Golongan ketiga terdiri dari negara-negara yang tidak mempunyai sumber minyak, akan tetapi sebelumnya berhasil memelihara ekonomi yang relatif seimbang pada waktu sekarang, ekonominya tergoncang. Menurut angka-angka World Bank negara-negara yang paling peka ekonominya di dalam krisis energi adalah Bangladesh, Ethiopia, India, Kenya, Mali, Pakistan, Sri Lanka, Sudan, Tanzania dan Uganda. Diperkirakan bahwa untuk tahun 1974 negara-negara tadi harus membayar 10.000 juta dollar untuk mengimpor minyak bumi dan komoditi yang dibuat dari minyak. Jumlah uang tadi jauh lebih besar daripada jumlah bantuan ekonomi yang diberikan oleh negara-negara industri kepada negara-negara berkembang. Daftar negara-negara tadi, menunjukkan bahwa terkecuali Mali, semua negara lain terletak di kawasan Samudra Indonesia.

VI. Benih-benih Pertentangan di Sekitar Samudra Indonesia

Negara-negara berkembang di sekitar Samudra Indonesia, setelah menjadi merdeka, menghadapi persoalan-persoalan yang dapat atau yang sudah menimbulkan keretakan dan perpecahan dalam masyarakat masing-masing, yang akhirnya berkembang menjadi gerakan-gerakan bersenjata yang melawan pemerintah yang sah.

Burma, sejak menjadi merdeka sudah menghadapi gerilya dari golongan-golongan White Flag dan Red Flag Communist, dari suku Karen dan Shan. Di Thailand di perbatasan Utara terdapat golongan bersenjata yang bersandar pada Vietnam Utara dan Laos, coraknya kiri. Di perbatasan Selatan Thailand terdapat gerakan Komunis yang bermukim di Thailand, akan tetapi beroperasi di Malaysia, di samping itu ada gerakan Pattani, yang bercorak Islam, karena menentang supremasi elite Thai yang beragama Budha. Di Timur Tengah terdapat gerakan-gerakan Pembebasan Rakyat yang melawan pemerintah-pemerintah Sheik. Pada tahun 1974 melotus keadaan gawat dengan mula-mulanya menggulingkan Kaisar Haile Selassie,

lalu pemberontakan gerakan separtatis di Eritrea, gerakan Islam yang tidak mau menerima supremasi elite yang terdiri dari suku Amhari, yang beragama Kristen-Kopt.

Semua contoh yang disebut merupakan peristiwa di beberapa negara yang menggambarkan bahwa ketidak-puasan satu golongan dapat menjadi gerakan bersenjata. Ketidak-puasan itu dapat didasarkan pada faktor-faktor ethnologis, suku melawan suku, ada pula religious, ada faktor daerah yang merasa dianak-tirikan oleh pusat, ada rasa cemburu karena satu daerah lebih maju dari daerah lain.

Di bagian Barat Samudra Indonesia terletak Afrika Selatan dan Rhodesia yang masih tetap melaksanakan politik apartheid yang dipandang sebagai ancaman oleh negara-negara tetangganya yang terdiri dari orang Afrika asli. Ketegangan ini mempengaruhi proses dekolonisasi Mozambique yang menurut rencana akan menjadi merdeka pada tahun 1975. Periode transisi di bawah pimpinan Frelimo belum tentu akan berjalan lancar.

Antara Kenya, Somalia terdapat sengketa perbatasan. Hubungan antara Tanzania dan Uganda terus memburuk.

Di semenanjung India terdapat pertentangan antara India, Pakistan dan Bangladesh, yang pernah memuncak menjadi peperangan.

Catatan Akhir

Setelah jajahan-jajahan di benua Asia dan di Afrika menjadi negara-negara merdeka, maka dalam gelanggang internasional timbul negara-negara baru sebagai anggota PBB, sebagai unsur-unsur merdeka yang ingin menentukan nasibnya masing-masing. Pada saat menjadi merdeka pemerintah-pemerintah negara baru, menghadapi tugas mulia dan berat untuk menyusun negaranya, baik dengan membangun struktur pemerintahan, alat kekuatan negara beserta penghidupan politik rakyat banyak. Tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat memerlukan pembinaan bidang ekonomi yang tadinya dikuasai sepenuhnya oleh bangsa asing. Perjuangan kemerdekaan untuk menghapuskan penjajahan berbeda dari satu negara dengan negara lain. Ada yang mengangkat senjata, seperti di Burma dan di Indonesia. Ada yang melakukan perjuangan kemerdekaan dengan mengadakan aksi di bidang politik seperti di India dan di Tanzania. Ciri-ciri perjuangan kemerdekaan memberikan arah kepada strategi nasional yang dirumuskan oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa pada waktu kemerdekaan diproklamlirkan.

Pengertian mengenai strategi nasional adalah: ketrampilan dan pengetahuan mengenai mengembangkan dan mempergunakan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, psikologi dan kekuatan militer agar tercapai kemanfaatan maksimal untuk melaksanakan strategi nasional.

Sekarang 20 tahun sudah lampau. Kebanyakan pemimpin-pemimpin yang mengepalai negara-negara baru waktu menjadi merdeka sudah meninggal dunia atau sudah diganti dengan pemimpin-pemimpin lain. Charisma yang diperlukan oleh pemimpin-pemimpin waktu memimpin perjuangan kemerdekaan ternyata dalam memimpin pemerintah lebih memerlukan ketrampilan memerintah yang tidak didasarkan lagi atas semboyan-semboyan melainkan atas kemampuan membangun sesuai dengan syarat-syarat administrasi dan teknologi modern.

Pun pula penghidupan politik yang semula dilakukan sesuai dengan norma-norma demokrasi yang berlaku di Eropa Barat dan di Amerika Serikat, sekarang di kebanyakan negara di sekitar Samudra Indonesia sudah diganti dengan sistim pemerintahan yang lebih sesuai dengan kondisi negara-negara di sekitar Samudra.

Di bidang ekonomi negara-negara di sekitar Samudra masih tetap merupakan produsen komoditi-komoditi yang diperlukan oleh negara-negara industri yang terletak di sekitar Samudra Atlantik dan di sekitar Samudra Pasifik. Faktor minyak merupakan faktor strategis di seluruh dunia.

Hasil ekspor komoditi-komoditi tidak menghasilkan pendapatan yang memadai untuk melaksanakan strategi nasional. Melonjaknya harga minyak bumi menurunkan nilai terms of trade dari negara-negara berkembang. Bantuan yang diharapkan dari negara-negara industri juga memperlihatkan angka-angka menurun.

Faktor-faktor penghasil komoditi-komoditi, perlunya bantuan dari negara-negara industri, di samping itu timbulnya RRC sebagai kekuatan baru merupakan faktor-faktor untuk menentukan hubungan internasional di Samudra Indonesia.

Perlombaan maritim antara Amerika Serikat dan Soviet dalam memelihara kesatuan-kesatuan armadanya, ditambah dengan rencana Amerika Serikat untuk mendirikan Diego Garcia sebagai pangkalan maritim, yang harus dilihat dalam rangka Guam Doctrine A.S. yang kemudian ditantang dengan Brezhnev Doctrine dari Soviet merupakan lanjutan konfrontasi antara dua superpowers di samping perhatian superpowers tadi terhadap pengombangan kehadiran RRC di Samudra Indonesia. Perkembangan strategis militer ini dipandang

sebagai ancaman terhadap strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh negara-negara berkembang di sekitar Samudra Indonesia.

Persoalan-persoalan mengenai ekspansi penduduk dan krisis pangan ternyata tidak mendapat penyelesaian, walaupun dibicarakan pada tingkat konperensi-konperensi internasional yang disponsori oleh PBB.

Interdependensi antara semua negara di dunia tidak memungkinkan terlaksananya satu politik dan strategi menyendiri. Hubungan internasional tetap diperlukan untuk stabilitas dunia. Penyelesaian mengenai problema-problema yang menghambat dan mengganggu pelaksanaan pembangunan harus dicari juga dalam kerjasama antara negara-negara di dunia.

Sejak kedatangan armada-armada Portugis sampai sekarang, hubungan internasional di Samudra Indonesia didominasi oleh usaha-usaha bangsa-bangsa dari luar Eropa untuk mendapatkan komoditi-komoditi yang diproduksi di sekitar Samudra. Mulai dengan komoditi cengkeh, disusul dengan komoditi-komoditi hasil perkebunan-perkebunan besar, timbul sekarang komoditi minyak bumi yang menonjol sebagai bahan strategis.

Usaha untuk mendapatkan monopoli dalam memperoleh komoditi-komoditi di sekitar Samudra, telah menimbulkan pertempuran-pertempuran laut antara armada-armada asing, dan menghasilkan hegemoni dari negara asing di perairan Samudra Indonesia. Dalam rangka pemikiran tadi, dapat dimengerti bahwa penarikan unsur maritim Inggris pada tahun 1968 oleh negara-negara Barat dipandang sebagai kenyataan bahwa di Samudra Indonesia telah terdapat "vacuum", kekosongan. Perlombaan antara kesatuan-kesatuan armada-armada Soviet dan kesatuan armada Amerika selanjutnya diartikan sebagai proses mengisi kekosongan.

Pernah armada-armada Eropa dapat mempergunakan kelemahan-kelemahan di kerajaan di sekitar Samudra untuk mendapatkan posisi-posisi unggul di beberapa pelabuhan-pelabuhan. Perkembangan itu dapat dimungkinkan karena pada waktu itu Samudra Indonesia berada dalam transisi, terutama di Indonesia, yang ditandai oleh lenyapnya kerajaan-kerajaan dominan seperti Majapahit dan belum mantapnya kerajaan-kerajaan baru seperti Demak, Banten dan Aceh. Di Semenanjung India Dinasti Baber mulai menguasai Semenanjung, yang kemudian terkenal sebagai Mogul Empire dengan Raja-raja seperti Akhbar, Shah Jahan, Arungzeb, akan tetapi kerajaan jaya itu merupakan kerajaan kontinental, seperti di Indonesia kesultanan Mataram, dengan Sultan Agung.

Konfrontasi antara kekuasaan maritim yang diperkuat dengan infra-struktur pelabuhan-pelabuhan, yang kemudian menjadi benteng-benteng kekuasaan kontinental akhirnya berhasil dengan keunggulan maritim.

Sejak mencapai kemerdekaan, negara-negara di sekitar Samudra juga berada dalam masa transisi, antara masyarakat penjajahan menuju ke masyarakat merdeka yang dicita-citakan. Macam-macam cara pembangunan sudah dilaksanakan di negara-negara di sekitar Samudra. Pada umumnya pola pemikiran penjajah di bidang ekonomi ditolak karena tujuannya jelas hanya akan menguntungkan si penjajah. Pembangunan secara sosialisipun tidak membawa hasil. Sekarang terdapat kecenderungan untuk melaksanakan pembangunan, walaupun dengan bantuan negara-negara kaya, akan tetapi dengan pola-pola pemikiran yang lebih sesuai dengan kondisi masing-masing negara.

Indonesia dapat merasa bahagia, karena Strategi Nasional, yang dilengkapi dengan Doktrin Ketahanan Nasional mengembangkan teori, bahwa negara **berkembang** seperti Indonesia tidak akan mengikuti "power-politics" seperti dilaksanakan oleh negara-negara maju, akan tetapi akan mengembangkan faktor-faktor yang dimiliki bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan beserta faktor-faktor letaknya geografis, penduduk dan kekayaan alam secara integral untuk dapat melaksanakan pembangunan demi kepentingan bangsa dan negara.

Doktrin Ketahanan Nasional merupakan doktrin tepat untuk menghadapi masa transisi yang dihadapi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di sekitar Samudra Indonesia. Masa transisi ini penuh dengan aspek-aspek security, yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan masyarakat yang sedang berkembang, terutama dalam menghadapi eksplosif penduduk dan krisis pangan. Akan tetapi juga disebabkan karena penghasilan-penghasilan komoditi-komoditi belum memadai untuk kepentingan bangsa. Indonesia, misalnya juga menghasilkan minyak bumi, akan tetapi eksplosif penduduk menimbulkan problema-problema yang dapat menghambat pembangunan.

Hubungan Internasional tidak lagi dibatasi pada rangka diplomasi antara Departemen Luar Negeri beserta diplomat-diplomat dari satu negara dengan Departemen Luar Negeri dan diplomat-diplomat dari negara lain. Hubungan internasional dilakukan di segala tingkat, antara pemerintah dengan pemerintah,

antara badan-badan swasta dan organisasi-organisasi politik, di bidang riset dan tukar-menukar cendekiawan. Faktor baru sejak perang dunia II adalah Multi National Corporations dari Amerika Serikat, Jepang dan Eropa Barat. Akumulasi modal dari Multi National Corporations sekarang mulai disaingi dengan akumulasi modal dari negara-negara produsen minyak di Timur Tengah. Kemampuan finansial negara-negara berkembang jauh kurang dari kemampuan-kemampuan finansial dari negara-negara maju dan korporasi-korporasi multinasional.

Aspek-aspek security sampai sekarang belum dapat diatasi, walaupun telah dibicarakan di forum-forum internasional di PBB dan lain-lain. Keadaan mendesak, karena krisis-krisis dunia ditambah dengan krisis penduduk dan krisis pangan diproyektir akan mempengaruhi kepekaan dan kelemahan konstelasi bangsa-bangsa di sekitar Samudra, dan ini dapat menimbulkan keretakan-keretakan dalam susunan masyarakat. Di beberapa negara keretakan sudah terjadi, yang bukan saja menghambat akan tetapi membahayakan pembangunan dan kelangsungan hidup bangsa, seperti terjadi di Pakistan.

Pernah di masa perjuangan pisik, Indonesia memiliki satu kebulatan tekad dari segenap bangsa dan dari semua golongan-golongan. Kebulatan tekad merupakan kesatuan pendapat untuk mencapai tujuan tertentu, pada waktu itu kemerdekaan bangsa. Kebulatan tekad merupakan kondisi mental, yang dimiliki bersama dan dipelihara karena ada lawan yang nyata - yaitu pasukan-pasukan penjajah dan ada dasar-dasar pengertian bersama mengenai kemerdekaan, yang dilahirkan dalam masa perjuangan kemerdekaan sebelum peperangan Pasifik.

Sekarang dalam fase pembangunan sudah terdapat suasana lain. Suasana semboyan sekarang diganti dengan kepemimpinan bangsa yang ingin membangun. Rumusan-rumusan yang terdapat di Garis Besar Haluan Negara, Buku-buku Repelita I, II dan seterusnya, RAPENI-RAPENI dari tahun ke tahun yang dibicarakan di DPR, semua menggambarkan suasana pembangunan yang berlaku. Rekonstruksi pemerintah, alat-alat pemerintahan dan AERI, beserta rekonstruksi penghidupan politik dalam wadah-wadah GOLKAR, PPP dan PDI menggambarkan bahwa pemerintah berusaha untuk menyusun infra-struktur dari pusat ke bawah.

Berlainan dengan fase gerilya, musuh yang dihadapi sekarang adalah kemiskinan, kemelaratan dan keterbelakangan masyarakat. Hal-hal yang nyata, tetapi tidak senyata seperti

pernah ada pasukan-pasukan musuh yang mendatangi desa-desa yang langsung mengancam kehidupan warga-warga desa.

Fase pembangunan sekarang, memerlukan juga kebulatan tekad untuk melaksanakan pembangunan. Proses pembangunan adalah proses yang memerlukan waktu lama. Kebulatan tekad tidak dapat dibangkitkan dengan pidato-pidato berapi-api seperti pernah terjadi waktu perjuangan kemerdekaan, kebulatan tekad tidak timbul spontan, akan tetapi harus dibangkitkan dalam rangka pelaksanaan integral dari segala segi kehidupan bangsa.

Seperti dalam strategi militer, terdapat rencana-rencana operasi yang merupakan integrasi dari semua unsur strategis, yang dalam pelaksanaan dengan jelas menentukan sasaran-sasaran, tetapi juga menentukan garis-garis antara, supaya dapat disusun kembali kekuatan-kekuatan operasional, maka strategi pembangunan secara integral memerlukan juga rencana-rencana operasional dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, melalui Gubernur, Bupati sampai ke Lurah-lurah. Yang perlu dipentingkan adalah garis-garis vertikal, antara pemerintah pusat ke bawah, akan tetapi lebih penting adalah garis-garis horizontal di tiap tingkat, yang memberikan wewenang dan kekuasaan penuh pada penguasa-penguasa bawahan.

Hanya dengan infra-struktur ketat, demi pelaksanaan operasi-operasi pembangunan, dapat tercapai dan terpelihara kebulatan tekad bangsa, yang merupakan syarat mutlak dalam fase pembangunan. Ide-ide kebulatan tekad di Indonesia dinamakan Ketahanan Nasional, di Malaysia - Rukun Negara, di Pilipina Selfreliance.

Keadaan telah mendesak, mudah-mudahan ide-ide yang baik dapat dituangkan dalam rencana-rencana operasional yang jelas. Hal-hal ini pasti akan besar artinya untuk membina security di kawasan Samudra Indonesia.



